

## BAB V

### PANDANGAN SURAT KABAR *KOMPAS* DAN *PIKIRAN RAKYAT* TERHADAP PENEMBAKAN MISTERIUS TAHUN 1983-1985

#### 5.1. Latar Belakang Penembakan Misterius Tahun 1983-1985

Indonesia masa kini, demikian berdasarkan berita dan media massa, penuh dengan kekerasan, ketegangan, konflik besar, kerusuhan dan perkelahian yang berkepanjangan. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa keadaan tersebut telah terjadi sejak jaman kolonial maupun setelah kemerdekaan. Perselisihan dan kekerasan sering terjadi dalam skala kecil dan skala besar yang melibatkan individu, keluarga, suku, desa, wilayah, dan golongan-golongan. Tidak jarang hal ini terjadi didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan yang akan menguntungkan mereka.

Frans Husken dan Huub de Jonge (2003:1) berpendapat bahwa kekerasan dan kerusuhan pun terjadi pada masa Orde Baru. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menyertai pada saat kelahirannya, tetapi Orde Baru juga terus hidup dalam praktik kekerasan itu. Tidak hanya kekerasan, kelahiran Orde Baru disambut dengan sejumlah keadaan yang sulit, seperti situasi politik yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang buruk bahkan stabilitas keamanan yang goyah akibat terjadinya sebuah peristiwa berdarah Gerakan 30 September.

Untuk memulihkan keadaan negara, Soeharto melaksanakan sebuah kebijakan yang disebut *Dwi Dharma* (dua kewajiban). Sedangkan pelaksanaan

kebijakannya sendiri dinamakan *Catur Karya* (empat tugas) (Roeder, 1969: 220).

Empat tugas tersebut yaitu:

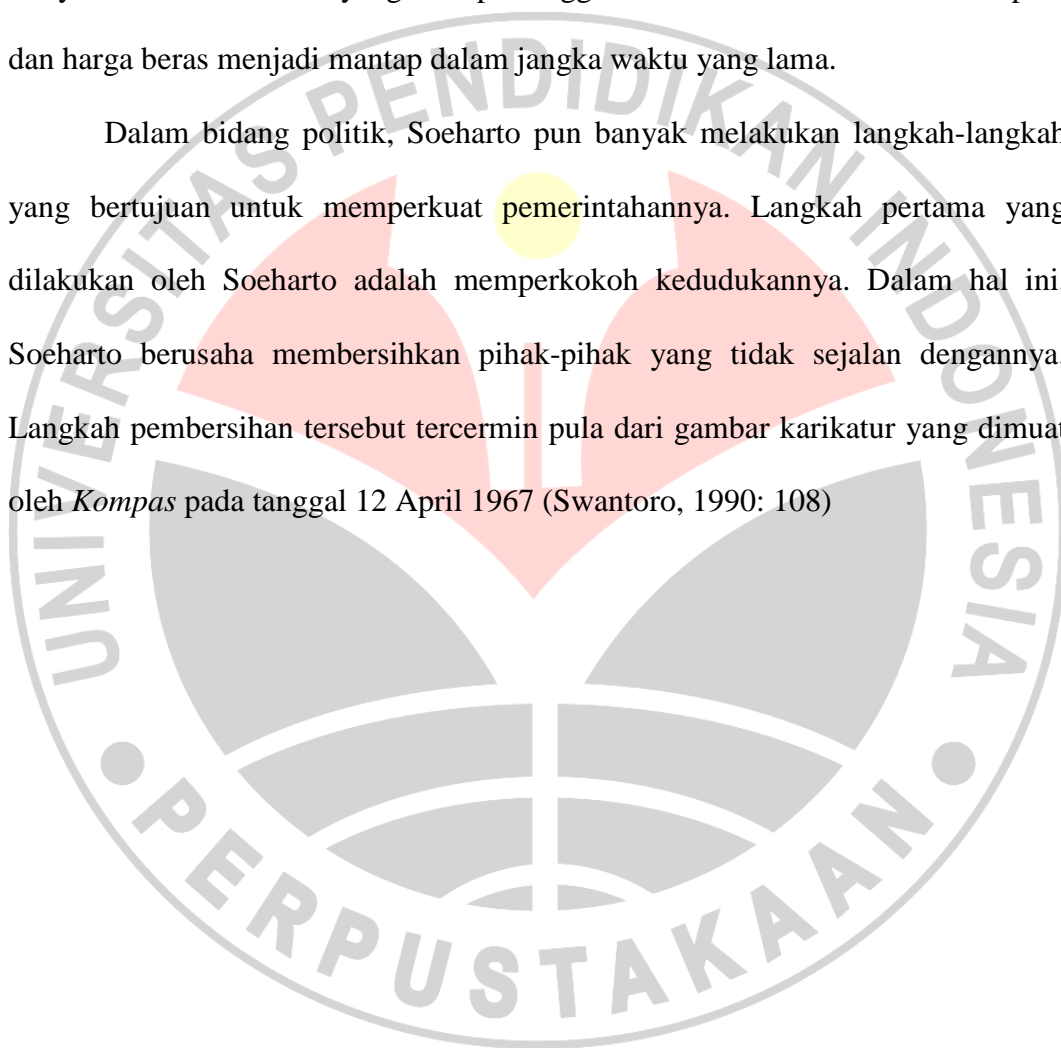
1. Memperbaiki taraf hidup rakyat, terutama dalam menyangkut sandang dan pangan;
2. Mengadakan Pemulihan Umum;
3. Meneruskan politik luar negeri bebas aktif;
4. Meneruskan perjuangan menentang imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Setelah mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar dalam negara, Soeharto membentuk suatu tim penasihat ekonomi. Tim tersebut terdiri dari staf ahli terkemuka yang langsung bertanggung jawab kepada Soeharto. Para ahli yang termasuk kepada tim tersebut antara lain: Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Widiyojo Nitisastro, Prof. Dr. Mohamad Sadili, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Tim penasihat ekonomi yang dibentuk tersebut mempunyai tugas penting dalam mengatasi masalah ekonomi yang ditimbulkan pada masa Orde Lama (Roeder, 1969: 221).

Pada awal pemerintahannya, Soeharto masih belum bisa memulihkan keadaan ekonomi. Saat itu, laju inflasi menunjukkan angka yang masih tinggi yaitu 120 %. Walaupun memang ada sedikit perbaikan, tetapi diakui oleh Soeharto bahwa pemerintah belum memperlihatkan gambaran yang menyenangkan perihal usaha-usaha agar rakyat membeli bahan makanan dengan harga yang pantas.

Permasalahan ekonomi yang ada pada saat Orde Baru lahir, pada akhirnya dapat ditanggulangi dengan kebijakan yang dikeluarkan Soeharto dan para penasihat ekonominya. Tahun 1969, Presiden mencanangkan semboyan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Kebijakan Soeharto ini ternyata membawa hasil yang cukup menggembirakan karena nilai tukar rupiah dan harga beras menjadi mantap dalam jangka waktu yang lama.

Dalam bidang politik, Soeharto pun banyak melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah memperkokoh kedudukannya. Dalam hal ini, Soeharto berusaha membersihkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Langkah pembersihan tersebut tercermin pula dari gambar karikatur yang dimuat oleh *Kompas* pada tanggal 12 April 1967 (Swantoro, 1990: 108)



Gambar 5.1

Karikatur *Kompas*, 12 April 1967

(Sumber: Swantoro. P, 1990. *Membuka Cakrawala 25 Tahun Indonesia dan dunia dalam Tajuk Kompas*. Jakarta: Gramedia)

Gambar karikatur tersebut memperlihatkan posisi seseorang yang berseragam (diinterpretasikan sebagai Soeharto) sedang membersihkan orang-orang yang tidak diinginkan dalam pemerintahannya. Pihak-pihak yang dibersihkan Soeharto adalah penguasa dan orang-orang yang pro Orde Lama, serta orang-orang PKI. Dari gambar karikatur tersebut terlihat bahwa Soeharto berusaha untuk menyapu bersih pihak-pihak tersebut agar tidak mengganggu pemerintahan yang dipimpinnya. Cara lain yang ditempuh Soeharto untuk semakin memperkuat kedudukannya adalah dengan menyelenggarakan Pemilu. Pada kenyataannya, pelaksanaan Pemilu membawa hasil yang cukup baik dalam hal kekuatan Orde Baru.

Setelah membangun Orde Baru, pada akhirnya Soeharto berhasil membawa rezimnya kepada masa keemasan yaitu dari tahun 1976-1988. Selama dua belas tahun Orde Baru mengecap keberhasilan yang luar biasa. Rencana pembangunan ekonominya disokong oleh melonjaknya harga minyak pada tahun 1970-an (Ricklefs, 2005: 593). Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7 %, dan tidak pernah berada di bawah angka 5 %. Prestasi ini kebanyakan dihasilkan dari pendapatan minyak, yang tetap tinggi hingga tahun 1982 (Ricklefs, 2005:594).

Prospek politik dari pemerintah Orde Baru tampaknya aman-aman saja pada akhir tahun 1970-an. Setelah mampu mengatasi krisis yang ada sebelumnya, Orde Baru Soeharto tampaknya akan langgeng, terutama setelah Golkar menang

pada Pemilu tahun 1977. Pada Pemilu waktu itu, Golkar mendapat 62,1% suara, sementara PDI mendapat 8,6 %. Karena adanya NU, PPP mendapatkan 29,3 %. Jadi, Golkar merebut mayoritas kursi DPR, dan tentunya memegang kendali atas anggota-anggota yang diangkat pemerintah. Pada tahun 1978, seperti telah diduga, MPR memilih Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh Soeharto pada saat itu memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya (Ricklefs, 2005:595).

Bersamaan dengan momentum kejayaan yang dialami oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru tetap saja dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah-masalah yang nyata adalah adanya kritik terhadap korupsi di tubuh pemerintah dan keluarga Soeharto. Angka korupsi yang sedemikian besar telah mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang Soeharto dan korupsi rezimnya. Namun, demonstrasi tidak berjalan lama seiring dibungkamnya mahasiswa dengan ancaman penjara. Salah satu mahasiswa yang di penjara adalah Herry Akhmadi (mahasiswa ITB). Ia dipenjara selama lebih dari dua tahun atas tuduhan menghina Presiden, DPR, dan MPR (Ricklefs, 2005:596) .

Tahun 1980-an Orde Baru pun dihadapkan pada gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun-tahun tersebut, banyak aksi-aksi teror dari sekelompok orang yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Aksi-aksi teror ini diawali dengan peledakan tiga buah bangunan terpisah di Jakarta, kemudian berlanjut pada aksi peledakan bangunan Seminari Al-Kitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang, peledakan di atas bis Pemudi Express, peledakan Candi Borobudur hingga peristiwa Tanjung Priok.

Pemerintahan Orde Baru sangat mengandalkan peran militer untuk memulihkan dan menjaga stabilitas keamanan negara. M. C. Ricklefs (2005: 602) menyebutkan bahwa pilar utama pemerintahan Soeharto adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bahkan jauh sebelum peristiwa teror terjadi, pemerintah membentuk sebuah badan baru non-struktural yang dinamakan Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Lembaga ini didirikan untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada waktu itu mengalami kegoncangan akibat peristiwa Gestapu (Pour, 1993: 491).

Catatan penegakan hak asasi manusia dari pemerintah Orde Baru tidaklah begitu bagus. Apalagi masih dibayangi oleh beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi pada rezim ini. Kekerasan pertama yang terjadi saat itu adalah peristiwa pembunuhan massal anggota simpatisan PKI tahun 1965-1966. Menurut catatan yang dikeluarkan tim dari AD, jumlah korban jiwa yang terbunuh berjumlah 78.000. Jumlah yang dikeluarkan tersebut bukan satu-satunya sumber yang ada. Perkiraan lain berkembang dan bervariasi jumlahnya, mulai dari yang paling kecil 78.000 sampai jumlah yang paling tinggi berkisar dua juta korban jiwa (Sulistyo, 2000:43).

Kekerasan lainnya yang menjadi sorotan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1980-an. Selama bulan Mei tahun 1983, hanya di sekitar Jakarta saja sempat tercatat tidak kurang 22 orang tewas tertembak. Angka pembunuhan dengan senjata api sebanyak itu segera mengejutkan masyarakat ibu kota. Selama ini belum pernah terjadi angka korban tewas kena peluru sebanyak itu. Selama

tahun 1982 saja, sepanjang tahun korban tewas terkena tembakan tidak lebih dari angka 41 orang. Suasana semakin mencekam karena menurut pengamatan masyarakat, para korban penembakan di Jakarta pada umumnya diketahui sebagai para *residivis*, yang pada tubuhnya selalu penuh dengan tato.

Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1983 sampai 1985 dikenal dengan *penembakan misterius*. Banyak dugaan yang menyebutkan bahwa peristiwa penembakan ini berawal dari kota Yogyakarta. Pada awal April tahun 1983, Letnan Kolonel Mohamad Hasbi, Komandan Kodim setempat mencanangkan sebuah gerakan penertiban keamanan yang diberi nama *Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK)* (Pour, 1993: 510).

Pelaksanaan operasi penertiban tersebut dilatarbelakangi oleh semakin merajalelanya pemerasan yang semakin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Pemerasan yang sering terjadi tersebut dilakukan oleh para gali (Gabungan Anak Liar). Model pemberantasan kejahatan yang dilakukan di Yogyakarta oleh Pangkowlhan II Letnan Jenderal Widjojo Soedjono dinyatakan akan diberlakukan juga untuk seluruh wilayah Indonesia (Pour, 1993: 510-511).

Pola pemberantasan kejahatan yang dilaksanakan oleh Yogyakarta, dengan cepat dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Banyak preman dan residivis ditemukan tewas dengan luka tembak. Jumlah korban jiwa akibat penembakan misterius ini diungkapkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencapai angka lebih dari 5000 jiwa (Husken dan de Joune, 2003: 88). Berkaitan dengan peristiwa ini, pihak berwenang seperti Komkamtib yang diwakili oleh Benny Moerdani (Pour, 1993: 512) menyebutkan bahwa:

*Penembakan misterius* yang sering terjadi saat itu timbul akibat perkelahian antar *gang*. Sebagai suatu negara hukum, penembakan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa. Ada orang-orang mati dengan luka peluru, tetapi itu akibat melawan petugas. Yang berbuat itu bukan pemerintah. Pembunuhan itu bukan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pihak militer menyatakan tidak terlibat dalam penembakan misterius tersebut. Yang ada hanyalah perkelahian antar *gang* yang meresahkan dan menelan korban jiwa. Persoalan penembakan ini akhirnya menjadi tidak lagi misterius. Dengan kalimat yang jelas, beberapa tahun kemudian Presiden Soeharto justru memberikan uraian tentang latar belakang permasalahannya. Presiden Soeharto menyatakan dalam otobiografinya (1989: 389) bahwa:

Dengan sendirinya kita harus mengadakan *treatment*, tindakan yang tegas. Tindakan tegas yang bagaimana? ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor!dor!dor!. begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak karena melawan, maka mereka harus ditembak. Lalu ada mayatnya yang ditinggalkan begitu saja itu untuk *Shock therapy*, terapi guncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas peri kemanusiaan itu. Maka kemudian redalah kejahatan-kejahatan yang menjijikan itu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya pemerintah mengetahui peristiwa ini dan tidak melakukan sesuatu untuk mengendalikannya. Tindakan keamanan tersebut memang terpaksa harus dilakukan, sesudah aksi kejahatan terlihat semakin brutal dan meluas. Pernyataan di atas *penembakan misterius* ini merupakan reaksi atas tingkat kejahatan yang terlalu besar dan meningkat. Meningkatnya angka kejahatan tersebut dihubungkan dengan penurunan ekonomi global, yang dialami Indonesia pada tahun 1982.



Kemerosotan ekonomi yang sangat tajam ini pun ditambah dengan arus migrasi ke kota-kota besar yang semakin meningkat sehingga angka pengangguran di perkotaan menjadi tinggi (Budiawan dalam Ajidarma, 2007: 185).

Lebih lanjut Beny Murdani menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu merupakan sebuah jalan yang diambil karena pengadilan benar-benar tidak mampu menangani gelombang kejahatan tersebut. Sejalan dengan itu, pasukan intelejen membunuh setiap penjahat yang dicurigai untuk memastikan bahwa penjahat tersebut memang benar seperti kenampakannya. Kalau dugaan sudah diperkuat, penjahat itu dihabisi begitu saja (Elson, 2005: 456).

Nico G. Schulte Nordhoff berpendapat bahwa peningkatan angka kejahatan ini pun dihubungkan dengan penyertaan *geng-geng* dalam kampanye pemilihan umum tahun 1982 (Husken dan de Jounge, 2002: 94). Pemilihan umum yang terkesan dikelola oleh pemerintahan Orde Baru ini “menyewa” tenaga dari kelompok-kelompok pemuda yang tidak terorganisir dan pemuda paramiliter, yang kebanyakan terdiri atas unsur-unsur bekas kriminal untuk ikut dalam demonstrasi-demonstrasi selama kampanye pemilihan umum. Aparat-aparat setengah resmi tersebut benar-benar telah menekan penduduk pedesaan untuk memberikan suara kepada GOLKAR (Husken dan de Jounge, 2002: 88).

Setelah pemilihan umum 1982, kelompok-kelompok kriminal itu menuntut imbalan “hadiah” mereka kepada pemerintah dan tingkat kejahatan demikian meningkat hingga derajat ketakutan di antara masyarakat menjadi tidak tertahankan. Faktor lain yang melatarbelakangi peristiwa ini adalah terletak pada sistem hukum itu sendiri. Tampaknya di dalam aparat peradilan, khususnya di

dalam sistem penjara, banyak orang yang dapat dibeli. Inilah mengapa para pemuka-pemuka kriminal dapat bebas dalam waktu yang cukup singkat. Penegakan hukum yang tidak kuat ini pun memuai protes dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Adnan Buyung Nasution, aktivis hak asasi manusia yang dikenal secara internasional dan pendiri YLBHI (Pour, 1993: 94).

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa prosedur hukum yang dijalankan pada tahun 1983-1985 ini tersekat-sekat. Pemerintah tidak konsisten terhadap ketetapan yang telah dibuatnya sendiri, terutama pada Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disetujui oleh parlemen tahun 1981. Dalam Undang-Undang tersebut, hak-hak seorang tertuduh dijamin secara progresif. Namun ironisnya pemerintah yang menerapkan sistem hukum ini menyetujui cara pemberantasan kejahatan yang bertentangan. Adnan Buyung Nasution bahkan merumuskan keadaan ini sebagai “anarki kekuasaan” (Pour, 1993: 84). Adapun jenis kekuasaan yang digunakan adalah kekuasaan *koersif* yaitu kekuasaan yang menggunakan aset (berupa senjata dan tenaga manusia) dengan kekerasan untuk mengubah orang lain atau menghukum mereka yang menghalanginya (Abdul Gafur:1987:57).

## **5.2. Pandangan Surat Kabar *Kompas* Terhadap Penembakan Misterius Tahun 1983-1985**

Pandangan surat kabar *Kompas* terhadap penembakan misterius pada sub-bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab kecil lainnya yaitu latar belakang penembakan misterius, peristiwa penembakan misterius, serta tanggapan yang

berasal dari masyarakat dan pemerintah terhadap penembakan misterius seperti apa yang diberitakan oleh *Kompas*. Pada sub-bab *pertama*, dipaparkan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penembakan misterius. Sub-bab *kedua*, menjelaskan peristiwa penembakan misterius tahun 1983-1985 berdasarkan berita (*news*) dan pandangan (*Views*) *Kompas*. Di dalamnya mencakupi bahasan mengenai korban, wilayah terjadinya penembakan misterius, pandangan *Kompas* serta dampak dari penembakan misterius. *Ketiga*, memaparkan tentang tanggapan pemerintah dan masyarakat seperti apa yang diberitakan oleh *Kompas*.

### **5.2.1. Latar Belakang Penembakan Misterius**

Pada tahun 1983-1985 topik mengenai penembakan misterius telah menjadi berita yang paling banyak dibicarakan. Sebagai surat kabar yang universal dan aktual, *Kompas* pun berusaha untuk menerbitkan berita (*news*) dan pandangannya (*views*) tentang peristiwa itu. Berita yang diterbitkan *Kompas* tidak hanya melingkupi daerah Jakarta namun menyoroti juga wilayah lainnya. Pandangan *Kompas* terhadap peristiwa penembakan misterius tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok, artikel bahkan gambar karikatur. Dimuatnya produk-produk surat kabar tersebut sesuai dengan visi-misi *Kompas* yang ingin menjadi surat kabar yang berpengalaman dan terhormat (*Kompas*, 28 Juni 1967). *Kompas* tidak hanya menyuguhkan berita yang sedang hangat dan dicari pembaca tetapi juga berusaha untuk mengupas tuntas permasalahan tersebut.

Penembakan misterius yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 1983-1985 bermula dari gerakan pemberantasan kejahatan yang dilakukan

di Yogyakarta. Gebrakan yang dilakukan tersebut berasal dari gagasan Dandim 0734 Letkol M. Hasbi. Gagasan itu dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat yang disebabkan oleh semakin tingginya angka kejahatan yang disebabkan oleh para Gali. Gerakan tersebut dinamakan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) (*Kompas*, 14 April 1983, hlm.1 ).

Dalam tajuk rencana yang berjudul *Idola-Idola Masyarakat* (*Kompas*, 15 April 1983, hlm. 4), disebutkan bahwa istilah Gali lahir dari singkatan Gabungan Anak-Anak Liar. Anggota-anggota yang termasuk ke dalam golongan Gali adalah pemuda-pemuda yang tidak saja dikategorikan nakal, tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat sebagai pengganggu keamanan. Mereka selalu minta uang dengan paksa, sedikit-sedikit unjuk kekuatan dan suka main hakim sendiri.

Operasi pemberantasan kejahatan yang telah dilakukan di Yogyakarta memang terbilang keras. Hasbi tidak segan-segan mengeluarkan tembakan untuk para pelaku kejahatan tersebut. Tindakan keras yang diterapkan di Yogyakarta memberikan hasil yang cukup menggembirakan bagi masyarakat. Berdasarkan berita yang diterbitkan *Kompas* pada tanggal 25 April 1983, angka kriminal di Yogyakarta menurun drastis. Penurunan angka kriminal tersebut dapat terlaksana dalam kurun waktu yang cepat yaitu hanya berselang empat minggu dari pertama kali dilaksanakannya operasi. Angka perampokan, penodongan dan pemerasan menunjukkan “nihil” pada bulan April, sedangkan jambret dan pencurian berkurang hampir 80 %.

Keberhasilan pemberantasan kejahatan yang telah dilaksanakan pada saat itu, pada akhirnya mendorong aparat keamanan untuk terus melaksanakan operasi

tersebut. Hal ini senada dengan berita yang dimuat *Kompas* pada tanggal 15 April 1983 dengan judul *Gebrakan di Yogyakarta akan Dilanjutkan Terus*. Dalam berita tersebut ditulis:

Operasi gabungan pemberantasan kejahatan yang sedang dilancarkan di daerah Yogyakarta tak akan dihentikan. Pengejaran kepada para “gali” bakal terus dilakukan hingga warga masyarakat hilang keresahannya. “Gebrakan ini akan terus kita lakukan. Hanya pola sistem yang digunakan akan mengalami perubahan” Ujar Letkol M. Hasbi.

Perubahan sistem yang digunakan adalah mengenai diwajibkannya para gali, residivis, dan preman untuk melaporkan diri kepada Polisi. Wajib lapor yang dikenakan kepada para gali tersebut bertujuan agar gerak-gerik mereka dapat terus terpantau dan terawasi. Berdasarkan berita *Kompas* pada tanggal 28 Mei 1983, jumlah gali yang telah melaporkan diri sampai minggu terakhir Mei tercatat 441 orang. Angka itu diungkapkan Dandim 0734 dan Garnisun Yogyakarta Letkol CZI Moh. Hasbi masih belum optimal. Ia mengharapkan jumlah gali yang melapor lebih banyak lagi, agar masyarakat semakin terjamin keamanannya.

Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1983-1985 tidak terlepas dari adanya keresahan yang terjadi di masyarakat. Dalam liputannya tanggal 1 Juni 1983, *Kompas* menyatakan bahwa keresahan yang ada di masyarakat diakibatkan semakin tingginya angka kejahatan yang dipengaruhi pula oleh adanya masalah-masalah kecil yang dibiarkan tumbuh. Penggalan beritanya adalah sebagai berikut:

Situasi resahnya masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan eksek dari masalah kecil yang dahulunya dibiarkan tumbuh. Salah satu masalah kecil itu adalah ketidakseimbangan dalam pertumbuhan masyarakat Indonesia yang tengah membangun. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh pembengkakan jumlah tenaga kerja dan menyempitnya lapangan pekerjaan.

Penyempitan tenaga kerja ini disebabkan oleh semakin majunya teknologi dan sebagian lagi diakibatkan oleh resesi.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai latar belakang semakin tingginya angka kejahatan, *Kompas* memuat artikel yang berjudul *Krisis Ekonomi dan Kejahatan* pada tanggal 2 Juni 1983. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa krisis ekonomi mempunyai korelasi dengan kejahatan dan bentuk perilaku menyimpang lainnya. Tulisan tersebut mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh M. Harvey Brenner. Ia mengidentifikasi beberapa pandangan mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan industri ilegal;
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat dari kesenjangan antara nilai atau tujuan sosial dengan sarana sosio-kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “inovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;

5. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya subkebudayaan delikuen;
6. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Berdasarkan pada tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong semakin meningkatnya angka kejahatan adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil (krisis). Krisis yang terjadi pada masyarakat kemudian membawa dampak baru salah satunya adalah menimbulkan pengangguran. Dalam keadaan yang terhimpit secara ekonomi, para pengangguran kemudian akan membentuk sebuah golongan dan pada akhirnya mengarah kepada kejahatan.

Menanggapi semakin meningkatnya gejala kekerasan yang terjadi pada tahun 1980-an, *Kompas* menerbitkan tajuk rencana pada tanggal 9 Juni 1983 dengan judul *Gejala Meningkatnya Kekerasan*. Isi tajuk rencana tersebut adalah sebagai berikut:

Sembilan ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Tribakti I di Jalan Kramat Sawah Paseban, Jakarta, dirusak oleh murid-muridnya sendiri.

Mereka kecewa, tidak dapat mengikuti ujian masuk sekolah lanjutan atas, karena formulir pendaftaran yang merupakan syarat, tidak diurus oleh Kepala Sekolah. Sebelum itu sudah ada gangguan lain dalam hubungan murid dan Kepala Sekolah.

Peristiwa itu salah satu contoh dari gejala yang akan kita soroti, yaitu gejala kekerasan dan main hakim sendiri. Terutama di kota-kota besar yang berpenduduk padat, gejala kekerasan itu terasa lebih tampil.

Jika tinjauannya melulu dari perkembangan masyarakat, tampaknya gejala kekerasan belum akan surut, mungkin malah bertambah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya. Jumlah penduduk bertambah lebih pesat dari pada jumlah tempat sekolah dan lapangan kerja yang tersedia.

Kehidupan di kota besar disertai perubahan yang begitu intensif dan keras, sehingga tidak semua warga mampu menyesuaikan dan menemukan tempat.

Kesempitan hidup bertambah terasa, oleh karena di kota-kota besar perbedaan-perbedaan sosial ekonomi dan lain-lain tampak nyata. Sementara itu perasaan acuh tak acuh juga lebih kuat.

Keadaan dan berbagai perlakuan yang dinilai tidak adil, lebih dirasakan.

Intensitas himpitan keadaan, kekerasan dan rasa tidak adil lebih hebat daripada kemampuan perangkat dan personalia untuk menanganinya menurut kebijaksanaan, menurut hukum dan menurut tindakan-tindakan sesuai dengan hukum. Akibatnya orang cenderung menyelesaikannya sendiri dengan kekerasan. Pada gilirannya bentuk kekerasan yang satu melahirkan bentuk kekerasan yang lain.

Dari tajuk rencana di atas, dapat diketahui bahwa gejala meningkatnya kekerasan di kota besar dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti dibawah ini:

1. Jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat.
2. Sekolah dan lapangan kerja yang tersedia sedikit
3. Perbedaan sosial ekonomi yang sangat besar
4. Kurangnya rasa toleransi yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup di kota.
5. Perangkat dan personalia hukum yang kurang bisa menegakkan hukum yang berlaku sehingga orang cenderung lebih mudah melakukan kekerasan.

Berdasarkan berita dan pandangan yang dimuat oleh *Kompas*, dapat terlihat bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi peristiwa penembakan misterius adalah tingginya angka kejahatan. Hal-hal yang melatarbelakangi tingginya angka kejahatan tersebut didorong oleh adanya permasalahan yang saling berkaitan yaitu masalah sosial, ekonomi dan hukum. Keadaan ekonomi yang tidak menentu pada saat itu membuat kehidupan masyarakat semakin keras. Untuk mempertahankan hidupnya, banyak masyarakat mengadu nasibnya di kota



sehingga mendorong angka arus urbanisasi semakin meningkat. Kurangnya lapangan pekerjaan pada saat itu pun telah membawa dampak lain yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran. Keadaan ekonomi yang tak menentu dan tidak adanya pekerjaan pada akhirnya mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

Meningkatnya kejahatan di Indonesia pada tahun 1980-an disebabkan pula oleh aparat penegak hukum dan keamanan yang tidak bertindak tegas kepada para pelaku kejahatan. Sikap yang tidak tegas tersebut kemudian memberikan dampak sikap tidak jera para penjahat terhadap hukum yang berlaku. Mereka cenderung bertindak seenaknya karena merasa tidak ada yang bisa melarang perbuatannya. Tindakan tidak tegas aparat pemerintah tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk tidak percaya kepada hukum. Salah satu bentuk ketidakpercayaan pada hukum tersebut dilakukan pula dengan cara kekerasan seperti penembakan misterius.

Pandangan yang diberikan *Kompas* melalui tajuk rencananya mengandung beberapa kritik terhadap pemerintah. Namun dalam penyampaiannya *Kompas* berusaha untuk lebih hati-hati dan halus. Surat kabar ini berusaha menengahkan permasalahan tanpa memihak siapa pun, baik itu pemerintah maupun pihak manapun. Kritik yang dilontarkan salah satunya adalah tentang penegakan hukum dan tentang kinerja aparat hukum agar lebih tegas dalam menjalankan tugas.

### 5.2.2. Peristiwa Penembakan Misterius

Model pemberantasan yang dijalankan Yogyakarta dengan sangat cepat meluas di daerah dan kota yang lainnya. Namun, berbeda dengan Yogyakarta Model pemberantasan terhadap kejahatan ini semakin meluas bahkan cenderung lebih keras dan berada di luar ketentuan hukum. Peristiwa tersebut dikenal dengan penembakan misterius (petrus). Berdasarkan berita-berita yang dimuat oleh *Kompas*, sebagai besar yang menjadi sasaran para penembak misterius adalah para Gali, bromoncorah, preman, residivis, jeger, dan sebutan lain. Para korban tersebut ditemukan tewas dengan luka tembakan di kepala dan badannya. Salah satu berita yang dimuat oleh *Kompas* adalah berita yang berjudul *Delapan Korban Lagi Tewas Akibat Tembakan* (*Kompas*, 21 Mei 1983, hlm. 3). Penggalan beritanya adalah sebagai berikut:

Delapan laki-laki tewas akibat tembakan ditemukan di berbagai tempat di Jakarta Kamis malam lalu. Lima ditemukan di wilayah Jakarta Selatan, dua di Jakarta Timur dan satu di Jakarta Barat. Dengan demikian, selama bulan Mei ini telah 17 orang tersangka pelaku kejahatan yang mati akibat tertembus peluru.

Selain berita di atas ada pula beberapa judul yang pernah diterbitkan *Kompas*. Diantaranya adalah: 113 Mayat ditemukan di Jawa Barat (*Kompas*, 22 Juni 1983, hlm. 3); Tiga Korban penembak misterius di Medan (*Kompas*, 25 Juni 1983, hlm. 3); Tiga mayat Bertato di Palembang (*Kompas*, 28 Juni 1983, hlm. 3); Tiga mayat Gali ditemukan (*Kompas* 17 Juli 1983, hlm. 3); Korban pembunuhan misterius (*Kompas*, 19 Juli 1983, hlm. 3); Seputar Jakarta: Korban penembakan (*Kompas*, 22 April 1984, hlm. 3); dan Lelaki bertato tewas ditembak (*Kompas*, 23 Januari 1985, hlm. 3).

Wilayah terjadinya penembakan misterius tahun 1983-1985 pun semakin meluas dari waktu ke waktu. Berdasarkan berita yang diterbitkan *Kompas*, penembakan misterius selain terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, juga terjadi di beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan seperti di Medan, Palembang, dan Pontianak. Namun, untuk jumlah korban yang menjadi sasaran penembakan misterius di setiap wilayah-wilayah tersebut *Kompas* tidak pernah melakukan akumulasi.

Bahasan lain yang diangkat *Kompas* mengenai penembakan misterius adalah tentang pelaku penembakan. Untuk menyoroti hal tersebut, *Kompas* menerbitkan gambar karikatur yang mempertanyakan siapakah *penembak misterius* itu. Gambar karikatur tersebut dimuat pada tanggal 8 Juni 1983.



Gambar 5.2  
Karikatur *Kompas* 12 Juni 1983  
(Sumber: Pt. Balai Iklan Bandung)

Gambar karikatur di atas memperlihatkan ketakutan seorang penjahat yang semakin terhimpit oleh *penembak misterius*. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa sosok si penembak tidak diketahui (misterius). Bagian gambar yang memperlihatkan pistol diberi tanda tanya dan berwarna hitam (gelap). Dalam gambar karikatur tersebut *Kompas* tidak secara berani memperlihatkan atau bahkan tidak tahu pihak yang terlibat dalam penembakan misterius. Pada saat itu *Kompas* hanya menekankan kepada latar belakang, tanggapan masyarakat serta hasil yang dicapai oleh *penembakan misterius*.

Pada saat itu, masyarakat banyak yang menganggap bahwa penembakan misterius tersebut dilakukan dan berdasarkan kebijakan pemerintah. Namun, anggapan tersebut disanggah oleh Pangab Beny Moerdani. Dalam berita yang diterbitkan *Kompas* pada tanggal 22 Juni 1983. Pangab menjelaskan bahwa:

Saya menilai, penembakan akhir-akhir ini terhadap orang-orang yang pernah dihukum, selain dilakukan oleh petugas keamanan juga dilakukan oleh anggota-anggota geng tertentu, yang diakibatkan persaingan di antara gang yang semakin keras.

Dari pernyataan tersebut, Beny Moerdani lebih menekankan bahwa peristiwa penembakan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan adanya perkelahian antar geng yang disebabkan adanya persaingan. Memang dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa aparat keamanan pun melakukan. Tetapi lebih lanjut Pangab Beny Moerdani menjelaskan kepada *Kompas* bahwa aparat keamanan tidak main tembak saja. Penembakan baru dapat dilakukan kalau dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Misalnya kalau yang bersangkutan melakukan perlawanan dan setelah diberikan tembakan peringatan tidak menyerahkan diri (*Kompas*, 22 Juli 1983, hlm.1).

Dalam memandangi peristiwa penembakan misterius *Kompas* pun sempat menerbitkan pandangannya. Pandangan tersebut dimuat dalam tajuk rencana yang diterbitkan tanggal 30 Mei 1983 dengan judul *Pemberantasan Kejahatan*. Isi tajuk tersebut adalah sebagai berikut:

Dilaporkan lagi oleh surat kabar-surat kabar, lima orang ditemukan tewas tertembak di wilayah Jakarta Timur pada hari Kamis dan Jumat lalu. Dengan tambahan itu, mereka yang tewas tertembak di Jakarta menjadi 22 orang. Bahkan ada yang menyebutnya 26 orang.

Belum jelas benar, apakah mereka itu residivis yang terkena operasi tegas yang pernah dilakukan di Yogyakarta beberapa waktu lalu ataukah juga diantaranya terdapat orang-orang yang menjadi korban pengeroyokan, pembalasan dan lain-lain.

Kabarnya, memang sedang dilakukan suatu operasi tegas terhadap para kriminal, terutama para residivis yang berbuat kejahatannya terhadap masyarakat yang tak berdaya telah kelewat-lewat dan tidak kenal jera dengan cara yang ditempuh secara konvensional sejauh ini.

Agar tidak simpang siur, bermanfaat kiranya masyarakat diberi penjelasan, mana yang korban penindakan tegas seperti yang dilakukan di Yogyakarta, mana yang justru menjadi korban kejahatan. Jika dibiarkan tanpa keterangan, masyarakat hanya menduga-duga dan jika keadaan itu menimbulkan rasa tidak pasti, mungkin akan timbul rasa was-was baru.

Sejauh yang tertembak adalah para kriminal-residivis yang menjahati warga masyarakat tak berdaya, kita mendapat kesan, masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak.

Mereka yang pernah menjadi korban atau mendengar dari teman atau saudaranya yang pernah menjadi korban, umumnya menyatakan setuju dengan cara penindakan tegas tersebut. Mereka berkomentar, tiada jalan lain untuk membuat jera.

Namun kita juga mendapat kesan terutama menghadapi kasus-kasus penembakan di Jakarta, orang banyak seakan-akan bersikap lebih banyak diam daripada membuat komentar atau reaksi apapun.

Sikap diam itu pertanda setuju atau pertanda cemas sendiri, belum jelas benar. Mungkin juga sikap diam itu terkandung rasa *tintrim*, takut salah jika memberi pendapat.

Jika kita boleh jujur, sikap kita pada umumnya menghadapi cara operasi itu mendua: ada rasa setuju, karena sudah kelewatan dan seakan-akan tiada jalan lain.

Rasa setuju, karena seakan-akan terjadi perpacuan antara tindak kekerasan kriminalitas yang meningkat dan menggelisahkan warga masyarakat dengan ketakmampuan atau ketidakefektifan cara dan sistem konvensional selama ini.

Jika suatu cara konvensional tidak mampu, tentu diperlukan cara lain. Orang akan berpendapat, cara lain itu haruslah tetap cara hukum sesuai dengan perikemanusiaannya Pancasila. Namun, reformasi sistem yang demikian itu, yang menyangkut proses reformasi penangkapan, pengadilan dan penghukuman, memerlukan waktu. Sementara itu, kekerasan tindak kekerasan terus berkecamuk.

Maka ditempuh cara inkonvensional yang efektif dalam makna menyelesaikan persoalan yang kriminal dan memberikan terapi kejutan. Barangkali cara inkonvensional itu dimaksudkan sebagai cara darurat untuk menyetop arus kriminal yang meningkat. Sementara memberikan waktu untuk mengadakan reformasi terhadap sistem konvensional.

Namun, betapapun kita mengerti persoalannya dilihat dari rasa tanggung jawab terhadap keamanan, rasa aman dan penindakan represif secara tegas, ada suara hati kita yang tidak dapat sepenuhnya menyetujui cara-cara inkonvensional.

Suara hati kita yang dibangun dalam rasa keadilan Pancasila, tidak dapat begitu saja membenarkan, bahwa seorang penjahat dihabisi secara radikal inkonvensional.

Malahan ada tambahan pertimbangan, apakah cara itu jika tidak disertai perbaikan sistem konvensional menurut hukum, jika keterlanjuran terus, tidak akan menimbulkan akibat sampingan?

Akibat sampingan itu misalnya, masyarakat juga menjadi kurang peka terhadap tindak kekerasan, dan jika sekali waktu ada kesempatannya akan juga menggunakan untuk dalih dan motifnya sendiri yang dapat bermacam-macam.

Persoalan semacam ini tidak dapat ditinjau secara hitam putih, sebaliknya, karena maksudnya adalah untuk melindungi rasa aman masyarakat, maka baik juga jika masyarakat menyampaikan pendapatnya. Agar dijaga jangan sampai masyarakat dihinggapi rasa kecemasan baru.

Persoalan semacam itu, sekali lagi tidak dapat dinilai secara hitam putih. Karena itu adalah bijaksana, jika segala segi permasalahannya ditinjau dan dimasukkan dalam pertimbangan.

Dari tajuk rencana di atas dapat dilihat bahwa peristiwa penembakan misterius ini meninggalkan banyak hal yang membingungkan. Kebingungan tersebut bukan saja dialami oleh *Kompas* tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Pada saat itu, tidak ada penjelasan tentang sebab berjatuhnya para residivist, gali dan preman. Apakah mereka itu termasuk kepada operasi yang dilaksanakan pemerintah ataukah hanya korban perkelahian antar gang yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pangab. Beny Moerdani. Untuk menjawab kebingungan yang ada

di masyarakat, kiranya pemerintah memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan situasi baru yang membuat was-was masyarakat. Kritik yang ingin disampaikan adalah *Kompas* menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan apakah penembakan tersebut dilakukan pemerintah ataukah kejahatan biasa agar tidak terjadi kesimpangsiuran di kalangan masyarakat. Kalaupun memang pemerintah tidak terlibat, diharapkan masalah penembakan tersebut segera diselesaikan.

Dalam tajuk di atas juga terlihat bahwa pandangan *Kompas* terhadap penembakan misterius mendua karena tidak bisa mengatakan sikap setuju atau tidak. Pandangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pernyataan setuju dilatarbelakangi keadaan yang terpacu oleh tindak kriminalitas yang semakin tinggi dan meresahkan masyarakat. Sedangkan, pernyataan tidak setuju berdasarkan pada akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh cara inkonvensional (*penembakan misterius*) terhadap masyarakat. *Kompas* memandang bahwa cara-cara inkonvensional akan membawa dampak negatif salah satunya adalah semakin tidak dihargainya hukum yang ada. Selain itu, masyarakat akan menjadi kurang peka terhadap tindakan kekerasan. Dimana suatu waktu masyarakat akan menganggap kekerasan menjadi hal yang biasa dan masyarakat akan mengarah kepada masyarakat yang anarki. Selain itu, *Kompas* kehilangan daya kritiknya. Terlihat tajuk yang disusun terlihat lebih hati-hati. Selain itu, surat kabar *Kompas* memposisikan dirinya sebagai *balancer* yaitu penyeimbang antara kepentingan media di satu pihak dan kepentingan publik di pihak lain.

Menanggapi lebih jauh keadaan masyarakat yang dikejutkan oleh peristiwa penembakan misterius, *Kompas* memuat artikel yang berhubungan dengan tema tersebut. Artikel yang dimuat pada tanggal 30 Juli 1983 berjudul *Pemberantasan Kejahatan- Dengan Cara Luwes atau Keras?* Artikel tersebut ditulis oleh Soerjono Soekanto yang merupakan sosiolog hukum dan staf pengajar di Universitas Indonesia. Dalam tulisannya tersebut, Soekanto menyoroti peristiwa penembakan misterius yang akhir-akhir itu sedang terjadi.

Pada awal tulisannya, Soekanto menyertakan tanggapan pro dan kontra terhadap penembakan misterius. Pernyataan yang tidak setuju, pada dasarnya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang eksistensi hukumnya diakui. Namun mengapa pelanggaran hukum tersebut seolah-olah disahkan secara diam-diam. Di pihak lain, tanggapan yang setuju atas peristiwa itu dikarenakan hasilnya yang tampak nyata, yaitu tingkat kejahatan semakin menurun drastis. Pernyataan setuju ini pun banyak dilontarkan oleh orang-orang yang dekat dan telah menjadi korban kejahatan.

Di negara hukum, supremasi hukum harus dipertahankan. Akan tetapi hal itu bukan berarti tidak boleh ada kekerasan sedikit pun. Selama hal itu dilakukan oleh negara, maka kekerasan boleh dilakukan asalkan tujuannya tetap mencapai kedamaian. Cara yang luwes sering kali dianggap sebagai "lawan" kekerasan; apakah tidak lebih baik kekerasan dianggap sebagai pasangan dari keluwesan, sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan sesuai dengan keadaan yang dihadapi.



Masalah keamanan yang terjadi di beberapa kota di wilayah Indonesia tentunya telah membawa korban. Yang sering menjadi korban adalah mereka yang setiap hari diliputi kecemasan atau merasa tidak aman. Mereka adalah orang yang sering menggunakan kendaraan umum, pedagang kecil, sopir maupun kondektur kendaraan umum. Di samping itu ada pula toko emas atau toko lainnya, serta tempat hiburan yang sering dimintai “sumbangan” tertentu agar tidak diganggu (atau dijamin keamanannya). Sangat jelas bahwa keadaan yang ada bukanlah yang dikehendaki. Masyarakat ingin hidup dan mengharapkan ketentraman dan ketertiban yang akan melahirkan rasa aman bagi masyarakat. Namun, apabila keinginan tersebut tidak terpenuhi, maka masyarakat akan berusaha untuk membuat wilayahnya aman dan tertib. Kalaupun dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan para pembuat onar kembali bebas. Hal semacam itulah yang kemudian mendorong masyarakat untuk “main hakim sendiri”. Dengan semangat ingin hidup damai mereka “menghabisi” para pelaku kejahatannya sendiri.

Tindakan main hakim sendiri (penembakan misterius) yang pada saat itu terjadi menandakan sesuatu, yaitu kurang berfungsinya penegakan hukum. Hal tersebut bisa disebabkan adanya kelemahan dalam perundang-undangan. Faktor lainnya dapat disebabkan oleh jalannya proses hukum yang memakan waktu lama (berlarut-larut). Kondisi proses hukum seperti ini pada akhirnya akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada hukum. Kalau pun penjahat berhasil diadili, sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu ringan dan dianggap kurang memadai. Dalam tulisan Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemberantasan

kejahatan cara pintas yang cenderung main hakim sendiri (penembakan misterius) tidak berdiri sendiri. Melainkan didorong oleh beberapa faktor. Soekanto tidak berusaha mencari tahu siapa pelaku penembakan misterius tersebut. Tetapi dalam tulisannya, dinyatakan bahwa penembakan misterius dilakukan oleh masyarakat yang sedang merasa resah akibat kejahatan.

Pada tanggal 12 Agustus 1983 *Kompas* kembali menerbitkan Tajuk rencana yang berhubungan dengan peristiwa penembakan misterius. Tajuk rencana tersebut berjudul *Melaksanakan Negara Hukum*. Dalam tajuk rencana ini, *Kompas* secara hati-hati melakukan kritik terhadap pemerintah khususnya dalam pelaksanaan hukum. Adapun penggalan tajuk tersebut adalah sebagai berikut:

DUA hal kita hadapi : berbagai persoalan meminta penyelesaian cepat dan tanpa kita sadari, timbullah di kalangan kita suatu kebiasaan jalan pintas. Jalan pintas ada kalanya melanggar asas hukum.  
Juga tampak di sana-sini, rumusan hukum untuk berbagai masalah telah ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.  
Pola apa yang perlu dikembangkan untuk mengatasi dua masalah tersebut? Perlu adanya reformasi yang aktual, sekalipun tidak boleh menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dan rasa terombang-ambing.  
Setiap kali pun diselenggarakan penyegaran birokrasi sehingga hukum tidak menjadi penghambat, justru pelancar dan penjamin kepastian.

Dalam tajuk di atas, *Kompas* menyampaikan bahwa pelaksanaan “jalan pintas” yang terjadi masa itu merupakan hal yang melanggar hukum. Untuk menjauhkan pelaksanaan “jalan pintas”, diharapkan pemerintah melakukan perbaikan hukum agar ketidakpastian dan rasa terombang-ambing oleh hukum hilang. Kehati-hatian *Kompas* dalam melakukan kritik terlihat pula dalam tajuk tersebut. Lagi-lagi surat kabar ini berusaha menghindari penggunaan kata “penembakan misterius”. Dalam tajuk tersebut, *Kompas* menggunakan istilah “jalan pintas”.

Selain membahas mengenai peristiwanya, *Kompas* pun ikut menyoroti dampak yang diakibatkan. Akibat jangka pendek yang ditakutkan akibat terjadinya penembakan misterius pada saat itu sudah mulai terasa. Tindak kekerasan yang pada awalnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pada akhirnya melahirkan kekerasan baru. Masyarakat semakin berani untuk main hakim sendiri dalam menanggapi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Keadaan masyarakat ini pun tercermin dalam pojok *Kompas* tanggal 5 Juli 1983. Pojok *Kompas* tersebut berisi:

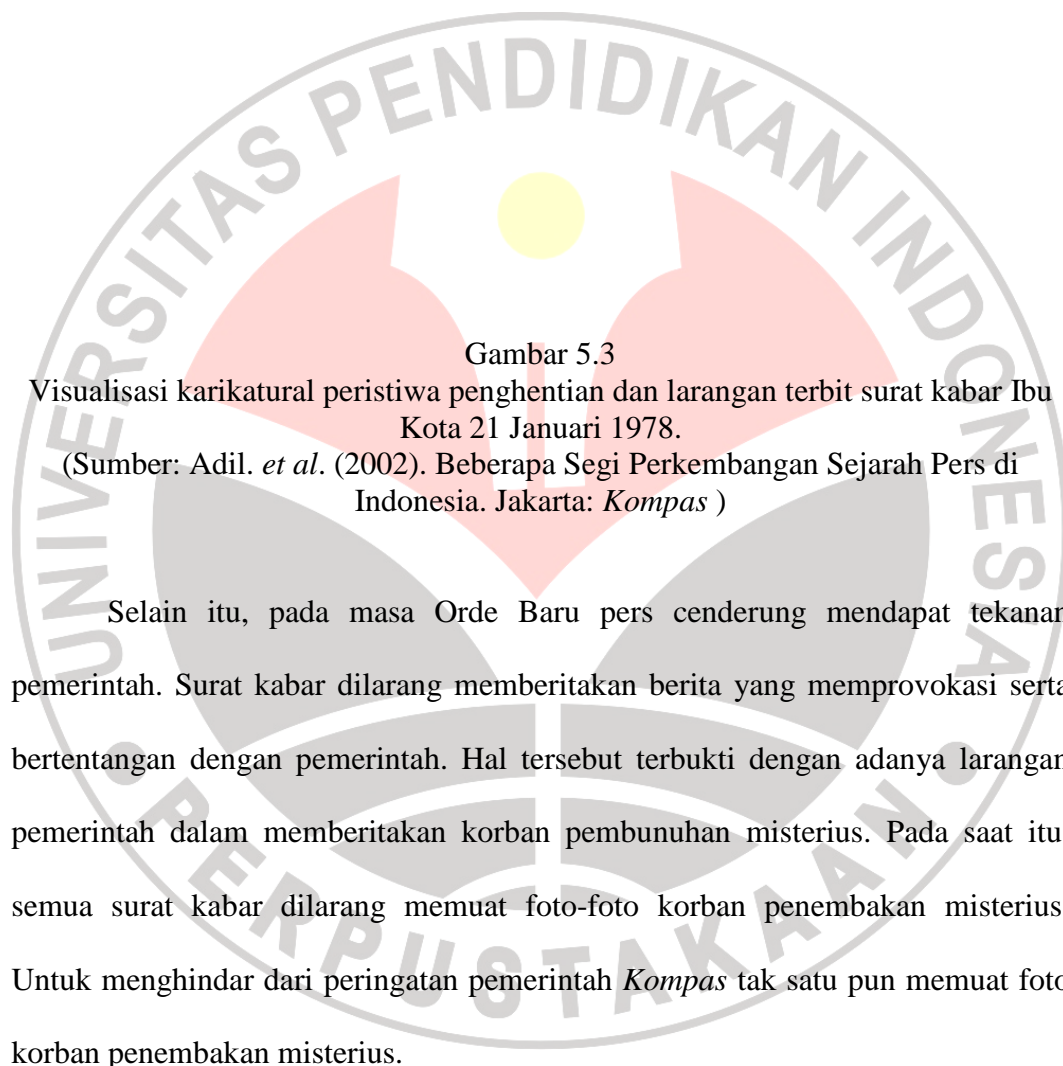
Kawanan penjahat asal Medan yang sedang beroperasi di wilayah Aceh, dikeroyok warga Ule Gle, Kabupaten Pidie. Mobil Mercy sewaan yang mereka gunakan beroperasi dibakar.

Tidak kalah hebat dengan “penembak misterius”....(Mang Usil)

Peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1983-1985 meninggalkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah berada dibelakang kejadian tersebut. Namun, dalam *Kompas* tidak berusaha bahkan tidak berani mengungkapkannya. Kritik yang disampaikan terhadap pemerintah pun lebih bersifat hati-hati dan halus. Salah satunya adalah pemilihan istilah-istilah yang digunakan dalam memberitakan penembakan tersebut.

Sikap hati-hati yang dipilih oleh *Kompas* berhubungan erat dengan sejarah *Kompas* yang pernah mengalami pembredelan pada awal Orde Baru. Sikap yang diambil tersebut cenderung untuk mencari aman dan menghindari pemberedelan kembali. Dibawah ini terdapat gambar yang merupakan visualisasi

karikatural mengenai peristiwa penghentian dan larangan terbit tujuh surat kabar harian ibu kota yang diumumkan pada tanggal 21 Januari 1978.



Gambar 5.3

Visualisasi karikatural peristiwa penghentian dan larangan terbit surat kabar Ibu Kota 21 Januari 1978.

(Sumber: Adil. *et al.* (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: *Kompas* )

Selain itu, pada masa Orde Baru pers cenderung mendapat tekanan pemerintah. Surat kabar dilarang memberitakan berita yang memprovokasi serta bertentangan dengan pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan adanya larangan pemerintah dalam memberitakan korban pembunuhan misterius. Pada saat itu, semua surat kabar dilarang memuat foto-foto korban penembakan misterius. Untuk menghindari dari peringatan pemerintah *Kompas* tak satu pun memuat foto korban penembakan misterius.

Larangan-larangan yang diterapkan kepada surat kabar-surat kabar di Indonesia memperlihatkan bahwa pers dipaksa untuk sejalan dengan cita-cita Orde Baru. Keadaan pers masa itu tercermin pula dalam gambar karikatur di bawah ini:

Gambar 5.4

Kritik-kritik pers menurut pandangan “Oom Pasikom” *Kompas*, 30 Mei 1977  
(Swantoro. P, 1990. *Membuka Cakrawala 25 Tahun Indonesia dan dunia dalam  
Tajuk Kompas*. Jakarta: Gramedia)

#### **5.2.4. Tanggapan Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Penembakan Misterius**

Peristiwa penembakan misterius telah melahirkan tanggapan yang beragam dari masyarakat dan pemerintah. Tanggapan yang berasal dari masyarakat dimuat pula *Kompas*. Tanggapan-tanggapan tersebut biasanya dilayangkan pembaca kepada redaksi dan kemudian dimuat dalam kolom surat pembaca. Dalam memandang peristiwa ini, tanggapan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu pihak yang setuju dan yang tidak setuju.

Salah satu tanggapan masyarakat yang setuju dapat dilihat dari surat pembaca yang dilayangkan oleh Nanang Gunadi kepada redaksi surat kabar *Kompas*. Tanggapannya dimuat pada tanggal 2 Juli 1983. Isi surat pembaca tersebut adalah:

##### **Terima kasih penembak Gelap**

Cukup lama kita diresahkan oleh penodongan, penjambretan, penggarongan, pembunuhan dan perkosaan. Kita kadang-kadang tidak

puas mendengar vonis yang terlampau ringan dibandingkan kejahatan yang dilakukan. Penjahat yang bernama Bakar bin Untung yang ditembak pada tanggal 23 Juni 1983 di Kalimantan Barat, ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan sebelum sempat diadili. Apakah karena hakim dan jaksa di negeri kita banyak yang bisa disogok, atau karena ancaman mengerikan bagi beliau-beliau, wallahu alam.

Melihat kenyataan seperti itu lahirlah barisan orang yang mencoba menegakan keadilan, tetapi karena dirasa bila di pengadilan/ tertangkap hukumannya ringan, bahkan sekeluanya dari penjara menjadi lebih ganas, diambil jalan pintas menamatkannya dengan tembak gelap.

Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih kepada para penembak gelap, karena bagaimanapun tindakan anda-anda cukup membuat jera penjahat kambuhan dan melegakan masyarakat.

Salam hangat dari saya, dan kalau boleh saya pesan untuk sekarang istirahat saja dulu, kalau nanti mereka kurang ajar lagi nah giatkan lagi tembak gelap itu. Untuk sekarang beri waktu pada mereka untuk memperbaiki diri.

Sebagai informasi, sasaran anda sekalian jangan hanya terbatas pada penjahat kriminal saja tapi juga itu para koruptor, manipulator yang jelas-jelas merugikan rakyat banyak yang selalu disuruh kencangkan ikat pinggang, sedangkan orang yang mencaplok rezeki rakyat bebas atau dihukum ringan.

Betul-betul rakyat sakit hati pada para koruptor dan manipulator serta hakim atau juga jaksa yang mau makan sogokan, atau oknum yang selalu mengancam serta menekan petugas penegak keadilan. Semoga ini juga menjadi perhatian anda.

Pada surat pembaca tersebut, terlihat bahwa Nanang Gunadi setuju dan berterimakasih terhadap apa yang telah dilakukan oleh penembak. Dalam surat tersebut pun dituliskan alasan Nanang menyetujui tindakan tersebut. Alasannya adalah karena ia kurang percaya akan hukum yang dijalankan di Indonesia terutama kepada para aparatnya. Para penegak hukum dan aparatnya tidak berhasil membawa masyarakat kepada ketentraman dan ketertiban. Akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, masyarakat lebih mendukung kepada para penembak misterius sekalipun apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Tanggapan masyarakat tentang peristiwa *penembakan misterius* pun pernah diangkat dalam Fokus Peristiwa Pekan Ini tanggal 3 Juli 1983. Dalam segmen itu dituliskan beberapa tanggapan masyarakat yang merasa gembira atas diberlakukannya tindakan tersebut. Tanggapan masyarakat yang setuju disebabkan oleh beberapa alasan. Namun, ada pula pernyataan setuju yang diiringi oleh pertimbangan atau cara lain dalam penanganan kejahatan. Fokus Peristiwa Pekan Ini berisi sebagai berikut:

“Kamu sangat bergembira akhir-akhir ini sering diberitakan adanya penembak-penembak misterius yang sedang galak membasmi gali di Indonesia. Sebenarnya penembak-penembak misterius itu sangat membahagiakan dan sekaligus menenangkan hati masyarakat. Semoga Ia dilindungi selalu oleh Allah Yang Maha Kuasa”.

“Akhir-akhir ini *mass media* banyak menceritakan pembunuhan misterius yang menghabisi penjahat-penjahat kambuhan yang selalu meresahkan masyarakat. Kami setuju sekali atas keberhasilan penembak-penembak misterius dalam menjalankan operasi menumpas penjahat tersebut, sehingga masyarakat yang tadinya selalu diliputi rasa takut dan resah menjadi rasa aman”.

“Salut dan terima kasih kepada alat negara dimana saja mereka berada, yang baik berdasarkan perintah resmi ataupun atas kesadaran sendiri telah bertindak tegas dan menyapu bersih pengacau-pengacau masyarakat dari tempat-tempat yang rawan”.

“Percayalah, sebagian besar masyarakat pendukung anda dalam tindakan anda yang terpuji, karena itu semua membuat kejahatan-kejahatan di kota-kota besar menurun drastis”.

“Banyaknya penjahat bertato yang didor, alhamdulillah membuat saya merasa sedikit aman. Mereka itu adalah orang-orang yang beritikad tidak benar, brutal, dan sok jagoan. Akhir-akhir ini setiap hari saya beli hampir semua koran dan mingguan, untuk mengecek berita-berita semacam itu. Mohon harian kompas muat fotonya besar-besar juga dengan kop berita yang besar”.

Kalimat-kalimat di atas kami kutip langsung dari bagian-bagian surat yang berdatangan dari pembaca. Cukup banyak surat yang datang ke meja redaksi kompas.

Tidak ada satu pun surat yang menyatakan keberatan terhadap pembasmian penjahat-penjahat yang sedang dilangsungkan. Semua menyatakan persetujuan dan dukungan.

Catatan akhir dari surat-surat itu memang berbeda-beda, mencerminkan pengalaman masing-masing dan kerisauan mereka selama ini. Ada yang dengan pikiran sesaat, tetapi ada pula yang memikirkan langkah lanjut dan akibat yang lebih jauh.

Sebuah surat menyatakan kerisauannya tentang segala kejahatan dan pemerasan keji yang terjadi di lingkungan usahanya, dan melaporkan nama-nama orang yang seharusnya juga ikut dibersihkan.

Surat kedua melaporkan apa adanya: "Ada kejadian, sudah diminta kalung/perhiasan serta uangnya ya sudah boleh, tetapi masih diperkosa di depan suaminya. Wah ini gila betul".

Surat ketiga menambahkan: "Coba saja bayangkan, orang pensiun yang berarti sudah lama mengabdikan pada Negara, jalannya sudah bongkok-bongkok, ambil pensiun. Di dekat terminal bis yang dulu di lapangan Banteng bapak yang sudah bongkok itu didorong jatuh. Uangnya diambil, surat-surat pensiun dibuang ke slokan."

"Banyak orang yang melihat kejadian itu tapi apa daya. Menolong orang itu berarti menanggung resiko ditusuk. Orang apatis, tidak mau ambil peduli. Laporkan atau jadi saksi, apalagi sampai menolong tukang jambret itu ditangkap, malah jadi beban. Takut nanti dibilang tidak ada bukti, salah-salah yang menolong bakal kejeblot, sekurang-kurangnya diancam."

Banyak kesimpulan yang bisa diambil, karena tercermin jelas dalam bunyi surat-surat sederhana itu.

Sebagian memang mencerminkan kelegaan, yang diwarnai oleh rasa puas seakan bisa ikut balas dendam, melalui "penembak misterius". Mungkin sangat banyak orang jenis ini dengan kadar puas mereka masing-masing. Selama ini mungkin mereka tidak mengalami sendiri, tetapi bisa langsung melihat sekelilingnya, sehingga hidup selalu dibayangi cemas dan was-was selama bertahun-tahun.

Juga pasti banyak orang merasa lega, karena kaitan hidup yang langsung dirasakan sekarang ini. Mungkin mereka menjadi korban pemerasan terus menerus juga sudah berjalan bertahun-tahun. Alasan lega mereka lebih banyak bersumber dari pengalaman dan kepentingan mereka sendiri.

Tetapi juga cukup banyak orang yang ikut lega sambil berharap, moga-moga penyelesaian sesaat ini bisa menghapuskan kepincangan masyarakat sekarang ini: orang tidak lagi berani membantu tetangga yang sedang menjadi korban kejahatan. Melapor pun tidak berani karena tidak ada jaminan hukum, tidak jelas kepada siapa orang bisa mendapat perlindungan.

Semua ini patut menjadi bahan pemikiran, seperti yang dicatat oleh buntut seorang pembaca:

"Namun sikap keras dan tegas ini tidak boleh berdiri sendiri. Momentum yang baik ini hendaknya juga dibarengi dengan perbaikan perangkat Negara. Seperti penegakan hukum yang adil dan memihak masyarakat banyak"



Pernyataan setuju terhadap peristiwa penembakan misterius pun tergambarkan dalam karikatur yang dimuat *Kompas* pada tanggal 24 Juli 1983.



Gambar 5.5  
Gambar Karikatur *Kompas* 24 Juli 1983  
(Sumber: Pt. Balai Iklan Bandung)

Gambar karikatur di atas menunjukkan seseorang yang setuju dengan adanya penembak misterius. Walaupun memang gambar penembak yang ada dalam gambar masih ambigu, apakah dilakukan oleh pemerintah atau oleh para penjahat akibat adanya perselisihan antar gang. Seseorang di sini diinterpretasikan bisa sebagai masyarakat, penguasa atau pemerintah. Sikap mendukung atau setuju atas penembakan misterius ini memang diperlihatkan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang merasa aman setelah para pemeras dan pelaku kejahatan tewas akibat terjangan peluru.

Sikap serupa pun seolah-olah diperlihatkan oleh pemerintah. Dimana pemerintah terkesan membiarkan aksi penembakan gelap ini terjadi. Bahkan adapula suara dukungan yang berasal dari beberapa pejabat Orde Baru seperti

Ketua DPR/MPR H. Amirmachmud (*Kompas*, 22 Juli 1983, hlm.1). Di dalam berita tersebut tertulis bahwa Amirmachmud menyatakan setuju terhadap penembakan misterius karena keresahan masyarakat akibat kejahatan sudah semakin tak tertahankan. Beliau berpendapat bahwa penembakan misterius terjadi karena adanya kejahatan. Beliau mengemukakan, hendaknya kita tidak hanya melihat kepada yang melakukan kejahatan tetapi juga kepada keselamatan masyarakat. Amirmachmud berkata bahwa: “Untuk menyelamatkan 146 juta lebih penduduk Indonesia ini, lebih baik kita korbakan sekian ratus penjahat”.

Tanggapan lain pun muncul dari Wakil Ketua DPA Ali Moertopo. Tanggapannya dimuat *Kompas* dalam berita yang berjudul *Penembakan Misterius Dapat Dipertanggungjawabkan* pada tanggal 28 Juli 1983. Dalam wawancara Ali Moertopo berpendapat bahwa penembakan misterius yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas hankam. Dasar yang dijadikan pertimbangan oleh Ali Moertopo adalah bahwa kejahatan harus dibasmi demi kepentingan masyarakat. Dalam wawancara tersebut, Ali Moertopo tidak mau berpendapat tentang keterlibatan aparat keamanan dengan penembakan misterius. Ali Moertopo menyatakan bahwa “Yang jelas masyarakat banyak merasa puas dan aman. Kedua, dilakukan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jangan sampai situasi ini menjalar seperti kejadian yang terjadi di negara lain yang tidak bisa dikontrol”.

Selain tanggapan yang menyatakan setuju, ada pula yang mengecam dengan keras terhadap operasi pemberantasan tersebut. Salah satu tokoh yang

menentang adalah Hans Van den Broek, Menteri Luar Negeri Belanda. Ia menyatakan, “kami berharap agar pada waktu mendatang pembunuhan ini diakhiri. Kami mengharapkan Indonesia dapat melaksanakan konstitusi dengan tertib hukum”. Selain harapan tersebut, Broek menyebutkan korban jiwa akibat pembunuhan misterius yang mencapai angka lebih dari tiga ribu orang (Pour, 1993:512).

Penyataan tidak setuju terhadap penembakan misterius pun dilontarkan oleh LBH Yogya. Dalam berita yang diterbitkan *Kompas* pada tanggal 29 Juni 1983, dijelaskan bahwa LBH Yogyakarta meminta agar bentuk-bentuk penembakan terhadap para tersangka “gali” harus dihentikan. Karena selain bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum yang berlaku, juga akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. LBH Yogyakarta lebih lanjut menyatakan bahwa ketidakpastian hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan, yang pada gilirannya dapat menjadi benih keretakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan surat pembaca yang dilayangkan kepada meja redaksi *Kompas* ada juga surat pembaca yang menyatakan sikapnya yang “setengah-setengah”. Surat tersebut dilayangkan oleh Iwan (*Kompas*, 25 Juli 1983). Suratnya berisi:

Penanggulangan kejahatan dengan *shock-therapy* berupa tindakan tegas oleh “penembak misterius” terhadap para pelaku kejahatan, senior maupun junior, telah menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Suatu gejala yang lumrah terjadi terhadap sesuatu yang dianggap baru. Kalangan yang pro menyatakan, setelah adanya tindakan tegas oleh “penembak misterius” terhadap para pelaku kejahatan, keamanan terasa semakin mantap. Kalangan yang kontra kendati tidak menolak adanya dampak pisitif yang nyata, tetapi sangat menghawatirkan bahwa tindakan tegas ini akan menimbulkan anarkisme, sebagai akibat sampinganya

Saya agaknya termasuk yang ½ pro dan ½ kontra (plin-plan?) Atas dasar itu, saya mencoba menengahkan suatu alternatif sederhana di dalam suasana pro dan kontra tersebut. Saya berpendapat, tindakan menekan atau kalau mungkin memberantas kejahatan oleh “penembak misterius” sebagai shock-therapy patut dilaksanakan terus, disesuaikan dengan diagnosa yang ditemukan pada saat-saat tertentu.

Hanya saja akan lebih halus dan mendekati keadilan, apabila di dalam memilih “sasaran” dibuat suatu kriteria tertentu. Hingga tidak semua kelas bromoncorah (kalau istilah ini masih diizinkan dipergunakan) digarap oleh “penembak misterius”. Misalnya “sasaran” hanyalah para bromoncorah yang sudah berprestai mampu menghabiskan nyawa korban paling sedikit lima belas kali (kalau dirasa kurang adil, angka ini masih bisa dinaikkan).

### **5.3. Pandangan Surat kabar *Pikiran Rakyat* Terhadap Penembakan Misterius Tahun 1983-1985**

Pandangan surat kabar *Pikiran Rakyat* terhadap penembakan misterius pada sub-bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab kecil lainnya yaitu latar belakang penembakan misterius, peristiwa penembakan misterius, serta tanggapan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah terhadap penembakan misterius seperti apa yang diberitakan oleh *Pikiran Rakyat*. Pada sub-bab *pertama*, dipaparkan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penembakan misterius. Sub-bab *kedua*, menjelaskan peristiwa penembakan misterius tahun 1983-1985 berdasarkan berita (*news*) dan pandangan (*Views*) *Pikiran Rakyat*. Di dalamnya mencakupi bahasan mengenai korban, cakupan wilayah, pandangan *Pikiran Rakyat* serta dampak dari penembakan misterius. *Ketiga*, memaparkan tentang tanggapan pemerintah dan masyarakat seperti apa yang diberitakan oleh *Pikiran Rakyat*.

### 5.3.1. Latar Belakang Penembakan Misterius

Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penembakan misterius dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka kejahatan. Sama halnya dengan *Kompas*, *Pikiran Rakyat* pun berusaha untuk menyoroti topik yang sedang hangat dibicarakan yaitu tentang penembakan misterius. Namun pada sub-bab ini akan dipaparkan mengenai berita (*news*) dan pandangan (*views*) *Pikiran Rakyat* mengenai latar belakang terjadinya penembakan misterius.

Pada tanggal 10 April 1983, *Pikiran Rakyat* menerbitkan pandangannya dalam kolom “Komentar Minggu Ini”. Komentar *Pikiran Rakyat* tersebut berjudul *Hari-hari tanpa kejahatan*. Isi komentar tersebut adalah:

ADA sebuah komentar “pendek” di halaman ini, hari sabtu kemarin. Sebuah komentar tentang kegiatan kriminalitas di Bandung.” Simaklah berita-berita kriminalitas yang tak pernah berhenti, ” kata komentar, yang kemudian diakhiri dengan pertanyaan: “Adakah hari-hari tanpa kejahatan? Dari renungan sesaat, sudah hampir pasti bahwa kita akan menjawab “ya” atas pertanyaan di atas. Frekuensi kejahatan memang terasa kian tinggi. Tidak hanya di Bandung saja, namun merata di semua kota besar di tanah air. Memang, hampir tidak ada hari-hari yang lewat tanpa kejahatan.

Berita yang kita baca di surat kabar-surat kabar tentang kejahatan, sudah tentu hanya kejahatan “besar” saja. Berita-berita kejahatan yang “kecil”, mungkin tidak memperoleh kolom dalam surat kabar. Maka kalau saja berita-berita kejahatan “kecil” pun dimuat pula, halaman-halaman surat kabar agaknya akan penuh peristiwa kriminalitas.

Tingginya frekuensi kejahatan mengisyaratkan, bahwa hidup kita semakin keras. Kita tidak hanya berhadapan dengan harga-harga yang bergerak naik semata-mata, tetapi juga dengan orang-orang jahat. Kita tidak hanya harus memikirkan usaha bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup, tetapi juga usaha-usaha untuk mempertahankan milik kita dari kemungkinan direbut orang-orang criminal.

Tingginya tingkat pengangguran, amat sering dikaitkan dengan tingginya frekuensi kejahatan. Dengan logika itu, maka kita tidak perlu heran mengapa kejahatan begitu sering terjadi. Sekalipun sudah tentu tidak semua pengangguran berkecenderungan untuk berbuat jahat.

Namun terkadang kita heran, mengapa banyak pelaku kejahatan yang ternyata bukan penganggur. Setidak-tidaknya belum berusia kerja. Sering

kit abaca dalam surat kabar adanya para siswa yang tertangkap basah melakukan kejahatan. Bahkan banyak siswa yang tertangkap itu ternyata bukan dari keluarga tidak mampu.

Hal itu mengisyaratkan kepada kita, bahwa kejahatan pun tidak bisa dilepaskan dari pendidikan moral. Siswa-siswa yang memperoleh pendidikan moral yang baik, secara formal maupun dalam pendidikan keluarga, ternyata mampu membebaskan diri dari pengaryh-pengaruh buruk kendati mereka tergolong keluarga tidak mampu. Untuk itu kita menyetujui langkah-langkah pemerintah yang meningkatkan upaya pendidikan moral dalam lingkungan pendidikan formal.

Dalam komentar diatas dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka kejahatan di kota-kota besar adalah tingginya angka pengangguran. Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan semakin kerasnya kehidupan yang diakibatkan himpitan hidup. Memang tidak semua pengangguran melakukan kejahatan tetapi *Pikiran Rakyat* menganggap bahwa pengangguran cenderung melakukan kejahatan. Selain faktor-faktor tersebut, angka kejahatan yang semakin tinggi disebabkan pula oleh pendidikan moral yang kurang. *Pikiran Rakyat* berpandangan bahwa pendidikan moral ini harus diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal seperti di sekolah.

Lebih lanjut *Pikiran Rakyat* membahas topik tingginya angka kejahatan dalam sebuah artikel yang berjudul *Dari Sistem Sosial Yang Tersumbat Kejahatan Sebagai Efek Peluberan* (*Pikiran Rakyat*, 31 Mei 1983. hlm.4). Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa kejahatan yang berkecenderungan sebagai gejala sosial merupakan *spillover effect* (efek peluberan) dari sistem sosialnya. Efek peluberan yang terjadi pada masyarakat pada saat itu diakibatkan pula oleh rendahnya daya absorpsi masyarakat terhadap kemiskinan. Daya absorpsi adalah suatu daya serap

atau peredam kegoncangan yang diakibatkan kemiskinan. efek peluberan sendiri memang dekat dengan kejahatan yang pada akhirnya tidak bisa dikendalikan.

Selain akibat efek peluberan dari sistem sosial yang tersumbat, angka kejahatan yang tinggi pun diakibatkan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Keadaan ekonomi yang tidak menentu pada saat itu diangkat pula dalam kolom sketsa masyarakat yang diterbitkan *Pikiran Rakyat* pada tanggal 3 April 1983. Dalam kolom sketsa masyarakat terdapat beberapa tokoh yang sedang bingung terhadap keadaan waktu itu. Tokoh-tokoh tersebut adalah Madhapi, Mang Endun, dan Mang Nana. Bincang-bincang yang terjadi antara mereka adalah sebagai berikut:

Mang Endun kembali mengetok-ngetok batok kepalanya, saking mumetnya. Dulu banyak orang yang heboh karena resesi. Apakah itu resesi? ia sama sekali tak mengetahuinya. Tak mengerti, lebih tak mengerti lagi banyak orang yang juga sama-sama tak mengerti tampaknya lebih panik kalau mendengar resesi.

“Mengapa panik?” tanya Mang Endun kepada rekannya Mang Nana.

“Karena orang lain pun panik. Masa iya tak ikutan panik. Salah-salah dibilang goblok, Nggak enak, tahu!” kata Mang Nana.

“Nah kalau yang itu barangkali memang mengerti. Apa itu devaluasi, koq tiba-tiba menjadi pembicaraan hangat. Mamang pun tampaknya ikut bernafsu bilang devaluasi. Apakah itu?” Tanya Mang Endun. Tapi rekannya malah tertawa kecut. Mang Nana memang punya tampang serba tahu, penampilannya pun bolehlah. Namun sebenarnya ia pun tak tahu apa-apa tentang devaluasi.

“Mamang kok mau berpusing-pusing segala. Kalau orang pada ketawa ngakak, apa salahnya kalau kita pun ngakak. kalau orang rebut bicara tentang devaluasi, mengapa kita harus ketinggalan pula. Teriaklah devaluasi meskipun tidak mengeti apa-apa tentang masalah itu. Nah selamatlah dari ejekan orang, atau terhindar dari panggilan ‘telmi’....!” kata Mang Nana.

“Apa pula itu telmi....?”

“Telat mikir, kayak Mamang...!” jawab Mang Nana sambil terpingkal-pingkal.

“Sialan malah semakin mumet!” Jawab Mang Endun sambil mengetuk-ngetuk batok kepalanya. Makin tidak mengerti lagi, karena sejalan dengan ribut-ribut masalah devaluasi, ternyata harga-harga barang semakin

melonjak. Terigu dan semen pada menghilang. Toko-toko emas, malah pernah pada tutup tak mau jual emasnya. Lalu ‘dunungan’ (majikan) Mang Endun terlihat kocar-kacir sambil teriak-teriak tentang dollar.

“Heh, Mang. Tahu dollar?” teriak majikan Mang Endun.

“Dollar? apa itu dollar? oh, ya saya tahu, itu kan nama seekor burung hwa-me...! jawab Mang Endun sambil terperangah.

“Itu mah “si Dollar” atuh, burung yang suaranya cukup merdu sehingga harganya sempat mahal, sehingga diburu orang persis kayak orang sekarang sedang memburu dollar. Tahu dollar? Tu mata uang Amerika Serikat!” sang majikan berteriak sambil berkecak pinggang. Mang endun semakin tidak mengerti apa pula urusan mata uang asing itu. Padahal kita hidup di negeri Indonesia yang memiliki mata uang rupiah. Apa hubungannya dengan dollar , apa pula sebabnya majikannya itu sampai tergila-gila sama dollar.

“Ih, jaman apa pula ini teh!” rintih Mang Endun

“jaman resesi dan devaluasi Mang?” kata Madhapi yang merasa kasihan atas “penderitaan” yang menimpa mang Endun.

“iyah atuh yang menjadi pertanyaan sejak tadi. Apa itu resesi dan apa pula devaluasi?” kata Mang Endun dalam nada mau ‘mewek’.

“ Kalau masih juga tak terjawab mengapa pula harus dipikirkan secara mendalam? toh dulu ada seorang bapak pimpinan yang berkata: masyarakat kah tidak tahu dan tak mau tahu apalagi itu resesi dan devaluasi. Tapi Mang, coba inget-inget dengan tenang. Begitu ramai diperbincangkannya resesi, ah tahu-tahu banyak buruh yang dipecat. Upah buruh pun tak naik, demikian pula dengan upah pegawai negeri. Pabrik-pabrik pada bangkrut, barang-barang menumpuk di pasaran tak ada yang membeli’ Muncul pula kasus rawan daya beli, eh meningkat rawan pangan seperti apa yang terjadi di gunung Halu Kabupaten Bandung. Nah.....!”

“ Nah, nah, jadi resesi masa sulit penuh kepahitan hidup. lalu apa pula dengan devaluasi?” kata Mang Endun yang kini pikirannya agak terbuka.

“Artinya, artinya. Eh, nanti saya pingin nanya. Mamang punya uang Rupiah?”

“Jelek-jelek saya masih mengantungi uang barang beberapa ribu Rupiah. Tu dalam celengan “semar”.....!” jawab Mang Endun.

“Nah kita hitung untung-ruginya. Misalnya uang celengan itu ‘dibobok’ dan isisnya taruhlah sekitar Rp. 10.000,-. Belikan emas.....!”

“Pasti dapat kira-kira satu gram. Kan lumayan buat anting-anting anak yang paling kecil!”

“Ngak bisa sekarang mah Mang. Harga emas begitu devaluasi diumumkan sudah melonjak kira-kira Rp. 13.000,-/ gram...!”

“Kalau begitu rugi dong. Eh, Semar-Semar. Dulu saya pilih celengan Semar dengan harapan punya mukjijat. Kiranya malah rugi!”

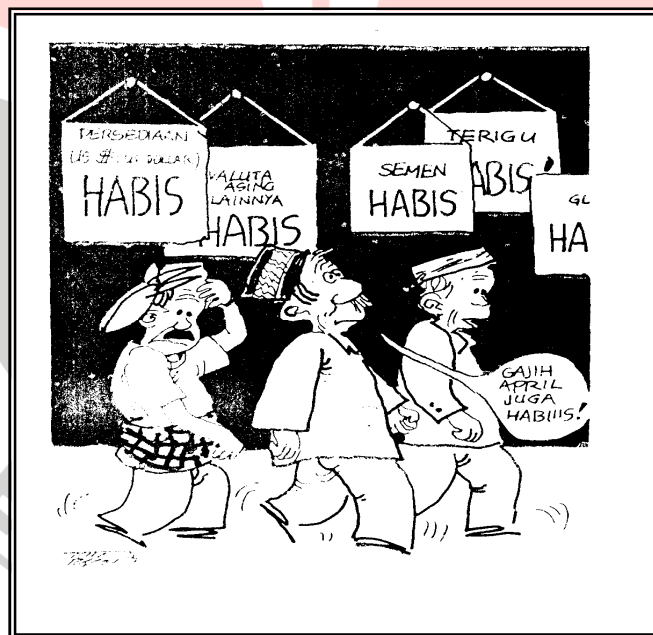
“Eh, nanti dulu. Orang yang suka menabung akan tetap lebih mujur dibandingkan orang yang sama sekali tak pernah menabung. Dalam masalah sulit seperti sekarang ini, Mamang tak usah uring-uringan cari pinjaman kesana-kemari. Uang dalam celengan Semar itu pasti bisa



membantu, walaupun nilainya agak menurun gara-gara devaluasi....!”  
(MADHAPI)

Dari sketsa masyarakat tersebut terlihat masyarakat saat itu tengah dipusingkan dengan resesi ekonomi dan devaluasi. Resesi dan devaluasi tersebut telah membuat himpitan ekonomi semakin mendesak. Terigu, gula, semen bahkan dollar pun mengalami kelangkaan. Walaupun dengan kondisi seperti itu, *Pikiran Rakyat* melalui tokoh Madhapi berusaha untuk mengajak masyarakat tidak panik dan melakukan hal yang baik seperti menabung.

Sketsa masyarakat pasa saat itu pun dapat terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 5.6

Gambar Sketsa Masyarakat *Pikiran Rakyat* 3 April 1983  
(Sumber: Pt. Balai Iklan Bandung)

Masih menanggapi masalah tingginya angka kekerasan yang terjadi di masyarakat, *Pikiran Rakyat* memuat artikel yang berjudul *Mengapa Tindak*

*Kekerasan Meningkat*. Artikel ini dikeluarkan dalam 4 edisi dengan judul yang berbeda-beda. Edisi pertama diterbitkan pada tanggal 16 Mei 1983. Judulnya adalah *Sumber Kekerasan Adalah Nafsu Manusia*. Dalam artikel tersebut, redaksi PR memuat pendapat yang dilontarkan oleh Ny. Sadili (Sosiolog). Beliau berpendapat bahwa kekerasan muncul disebabkan oleh tiga kemungkinan, *pertama* pelaku kekerasan itu meniru karena di lingkungannya selalu terjadi kekerasan. *Kedua*, pelaku kekerasan itu sejak semula tidak berusaha dan belajar mengontrol dirinya dan *ketiga*, pelaku kekerasan itu mempunyai penyakit jiwa tertentu.

Dalam artikel tersebut dijelaskan pula bahwa kekerasan itu muncul manakala kita tidak dapat mengontrol diri. Orang yang tidak atau kurang bisa mengontrol diri biasanya diakibatkan karena orang itu tidak pernah belajar dan tidak pernah dituntut lingkungannya untuk mengendalikan diri. Kemampuan diri seseorang untuk mengendalikan diri biasanya tergantung kepada nafsu yang ada didiri setiap orang. Nafsu cenderung meningkat jika mendapatkan pengalaman baru. Misalnya pengalaman memegang uang banyak karena kebetulan bekerja di tempat basah.

Judul kedua yang diterbitkan oleh Tim Wartawan *Pikiran Rakyat* tanggal 17 Mei 1983 adalah *Kekerasan Timbul Dari Masyarakat Yang Kecewa*. Dalam artikel tersebut dituliskan:

Meningkatnya kekerasan baik dalam kuantitas maupun kualitas adalah gejala yang ditimbulkan dari sikap masyarakat yang kecewa. Kekecewaan itu muncul karena kenyataan-kenyataan yang ada tidak seimbang dengan cita-cita yang diharapkan masyarakat.

Rasa kecewa yang ada dalam diri masyarakat pun timbul karena merasa tidak pasti dalam kehidupan mereka. Untuk gambaran Indonesia diperkirakan bahwa kekecewaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehausan kekuasaan. Kekuasaan disini bukan arti politik, tetapi dalam arti yang lebih luas. Masalahnya adalah mereka yang ingin menguasai sesuatu ternyata tidak terwujud, sehingga muncullah kekecewaan itu. Pelampiasannya mula-mula dengan mabuk-mabukan, tetapi kemudian meningkat dalam bentuk-bentuk kekerasan. Misalnya adalah apa yang terjadi pada para Gali, preman dan pelaku kejahatan yang lain.

Artikel ketiga yang masih membahas gejala kekerasan ditampilkan dalam tulisan yang berjudul *Ketidakpercayaan Terhadap Hukum (Pikiran Rakyat, 18 Mei 1983)*. Sesuai dengan judulnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan adalah adanya rasa tidak percaya kepada hukum. Secara teknis di pengadilan orang yang salah bisa dibenarkan dan yang benar bisa disalahkan. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan orang-orang merasa tidak puas terhadap pengadilan dan berkembanglah rasa tidak percaya kepada hukum.

Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan kekerasan adalah kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Angka kemiskinan yang tinggi semakin memperlebar jurang antara orang kaya dengan yang miskin. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa “Kesenjangan yang demikian tajam itu menimbulkan perasaan jengkel bagi yang bernasib tidak baik, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk melakukan tindakan sadis”. Jadi, pada dasarnya peluang terjadinya kekerasan lebih besar ditimbulkan oleh adanya kesenjangan

antara golongan miskin dan kaya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan orang mencari jalan pintas dengan kekerasan.

Artikel terakhir yang disusun oleh Tim Wartawan *Pikiran Rakyat* mengenai tema kekerasan berjudul *Gerakan Masyarakat Yang Paling Bawah* (*Pikiran Rakyat*, 18 Mei 1984). Artikel tersebut menjelaskan tentang cara penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Menurut *Pikiran Rakyat*, penanggulangan kekerasan harus dari “rumput yang paling rendah” yaitu gerakan dari masyarakat yang paling bawah. Masyarakat tidak dapat terus mengandalkan intruksi pemerintah atau petugas. Karena cara semacam itu akan bertahan sebentar dan beberapa waktu kemudian akan kambuh lagi. Cara terkecil yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengendalikan diri sendiri dan kemudian mengontrol lingkungan terdekatnya.

*Pikiran Rakyat* terus melakukan liputan dan menerbitkan pembahasan-pembahasan mengenai kekerasan kepada masyarakat. “PR” sendiri berharap bahwa pembahasan topik-topik tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat. Namun, tetap saja pada saat bersamaan kejahatan dan kekerasan masih tetap terjadi. Kondisi masyarakat pada saat itu pun tercermin dalam sketsa masyarakat yang diterbitkan pada tanggal 25 April 1983. Judul yang disuguhkan adalah *Sulit Menyembunyikan Kekayaan*.

Dalam sketsa masyarakat tersebut digambarkan keadaan masyarakat yang semakin resah akibat kejahatan. Perbincangan terjadi antara Mang Dana, Mang Endun, Mang Nana dan Madhapi. Pada saat itu, keresahan sedang dialami oleh Mang Dana. Ia bingung cara apa yang harus digunakan untuk menyembunyikan

kekayaan yang diperolehnya dari bekerja. Dalam menanggapi masalah ini Mang Nana, Mang Endun dan Madhapi ikut berbicara, bahkan ikut kebingungan. Kebingungan yang dirasakan oleh tokoh-tokoh tersebut dapat terlihat dalam penggalan perbincangan yang terjadi. Perbincangan tersebut adalah: “Apa di jual, dititipkan, disembunyikam, atau, atau.... Heh, kamu-kamu toh mesti berpikir juga bagaimana cara mengamankan harta kekayaan kita. ....?” teriak Madhapi.

Kebingungan yang dialami oleh tokoh-tokoh seperti Mang Dana dan Madhapi tergambarkan dalam gambar karikatur.



Gambar 5.7

Gambar Sketsa Masyarakat *Pikiran Rakyat* 25 April 1983  
(Sumber: Pt. Balai Iklan Bandung)

Dalam gambar dibawah ini terlihat bahwa kedua tokoh tersebut resah dengan ulah para penjahat dan perampok yang kerap melakukan kejahatan seperti perampokan dan pemerasan. Kejahatan memang sangat meresahkan, hal tersebut dapat dilihat dari gambar yang memperlihatkan sosok pencuri atau perampok yang sedang memperhatikan perbincangan antara Madhapi dan Mang Dana.

Keresahan masyarakat yang semakin meningkat pada akhirnya mendorong dilaksanakannya operasi pemberantasan keamanan. Kota pertama yang melakukannya adalah Yogyakarta. Menanggapi model pemberantasan kejahatan di Yogya, *Pikiran Rakyat* memberikan pendapatnya dalam kolom sketsa masyarakat. Sketsa masyarakat itu berjudul “*Lalu Apa Yang Mau Digali.....?*” (*Pikiran Rakyat*, 1 Mei 1983). Isi kolom sketsa masyarakat itu sebagai berikut:

Setiap Bi Madhapi mau berangkat ke pasar atau tempat-tempat keramaian senantiasa diikuti bayangan ketakutan, kecemasan, serta gambaran keresahan lainnya. Begitu berangkat langsung merasakan ada orang yang sedang menguntit atau sedang mengawasi. Meskipun tidak ada orang yang memperhatikannya.

Tapi itu perasaan tidak mau dilepaskan begitu saja. Setiap naik kendaraan umum, rasa curiga mencurigai antar sesama penumpang timbul. Siapapun yang duduk di sampingnya seakan-akan mau menerkam setiap saat, setiap langkah, setiap ada kesempatan.

Bi Madhapi semakin terkesiap manakala Mbok Minah tetangganya ceritera tentang “Gali” yang sedang diberantas di kota tempat kelahirannya, Yogyakarta.

“Gali? apa itu Gali? Apakah macamnya tukang gali pasir yang beberapa waktu tewas tertimbun galian di Lembang?” Tanya Bi Madhapi.

“Lho, si Bibi ini koq macem-macem. Inih mah bukan tujang gali pasir, tapi tukang menggali-gali rezeki orang. Kadang-kadang atau tidak jarang terjadi sambil main ancam, tak segan-segan pula main bunuh....!”

“Yeeeeey, makin nurustunjung. Lantas gimana seterusnya? sudah ditangani pihak berwajib?”

“Syukurlah, kita baru bisa merasa lega. Ternyata pihak berwajib memberikan dukungan sepenuhnya, Karena Gali memang tak bisa dibiarkan terus merajalela. Masyarakat Yogya pun punya keberanian lagi untuk menghadapi para Gali!” kata Mbok Minah.

“Sebentar, Mbok. Kita, eh, terus terang belum mengerti apa yang dimaksud dengan Gali. Ya ampun, rupanya banyak istilah baru yang berkembang dengan cepatnya. Kita sih lebih banyak bercokol di dapur melulu. Jadi kurang begitu mengikuti perkembangan!” Tanya Bi Madhapi.

“Ssst, jangan rebut. Gali itu katanya , inih mah katanyah doing. Singkatan dari Gabungan Anag-Anak Liar....!” jawab Mbok Minah sambil ‘culang-cileung’ dan matanya jelalatan takut ada orang yang berusaha mencuri pembicaraan.

Bi Madhapi jadi terkesiap. Wajahnya pucat saking ketakutan.

“Berrrr....., kalau sudah berbicara soal anak-anak. kok ngeri juga. Tapi, Mbok jangan terlalu takut. Itu kan di Yogya. Di Bandung mah tertib.

Mbok, tertib. Nggak pernah ada anak-anak liar, tak pernah ada gelandangan, tak pernah ada perbuatan macem-macem entah di terminal, di stasiun, dipasar-pasar, di kendaraan umum. Tertib Mbok di sisnih mah, tertib. Nggak apa-apa, tanggung gak ada apa, sumpah deh memang Bandung mah Kota Tertib, KOTA Bersih dan Kota Aman. Mana ada gali di Bandung?” kata Bi Madhapi, tapi sambil bibirnya bergetar-getar, jantungnya berdetak lebih keras.

“Lho, Bibi koq gitu. Bicara soal situasi tertib, bersih dan aman, tapi kayak ketakutan luar biasa?!”

“Aaah, Mbok. Tahu sendiri, kita kan cuman anggota masyarakat biasa. Yang tak lain dan bukan hanya mengharapkan terciptanya rasa tertib, aman dan bersih. Apa sih yang patut ‘digali’ dari masyarakat semacam kita ini. Usia sudah tua, cari sesuap nasi susah tak ketulungan. Lha jangan pula beban yang terlalu berat menindih kehidupan ini, mesti ditambah lagi dengan masalah macem-macem. Bagi orang gedean sih gak ada masalah. Bisa menyewa pengawal pribadi atau memang telah mendapat jatah pengawal. Heh, nikmatnya! Kemana-mana ada yang ngawal. Bila ada yang berani mengganggu, heh, tahu rasa, bisa ‘neunggar cadas’. Kalau kita? siapa pula yang mau mengawalnya? Ada yang nodong di siang bolong, silahkan saja. Ada yang jambret dan copet di kendaraan umum, teriaklah sepuas-puasnya, orang laen tank pernah acuh untuk menolongnya. Sedang jualan sayur, hati-hati kalau sewaktu-waktu nongol pisau tajam, minta pungutan. Anak-anak sekolah pulang sambil ‘rawah riwih’ gara-gara uang jajannya dijegal orang. Pengusaha-pengusaha took tidak tentram melayani pembeli, pedagang dalam pasar terus-terusan mengeluh bukan karena dagangannya rugi. Tapi karena labanya di potong orang” tutur Bi Madhapi. Kemudian Bi Madhapi dan Mbok Minah tercenung berlama-lama.

“Apa yang Bibi bicarakan itu konon terjadi di Yogya. Galui Yogya, tentu saja nggal seguruh gudeg Yogya!” Ujar Mbok Minah.

“Ya, itu di Yogya. Namun jangan lupa mbok. Yang sedang diberantas itu tentu saja bukan manusia-manusianya. Tapi mentalnya, kelakuannya, serta langkah-langkah nya yang tidak terpuji. Kami cumin bisa mengharapkan, kembalikanlah ya Tuhan, anak-anak agar menjadi manusia yang berguna. Berilah mereka pekerjaan yang layak, sehingga anak-anak itu tidak lagi berbuat yang macam-macam. Betapun, mereka anak-anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri, jangan biarkan mereka terlena dan terbiasa dengan dunia kegelapan, penuh keputus asaan, penuh kesuraman masa depan. Bukakanlah mata mereka, hati mereka, langkah mereka kejalan yang benar, ke jalan yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa....!” kata Bi Madhapi sambil menitikan air matanya. (MADHAPI)

Sketsa masyarakat di atas menggambarkan situasi masyarakat tahun 1983.

Dalam sketsa masyarakat tersebut, dibahas pula tentang keadaan Yogyakarta yang

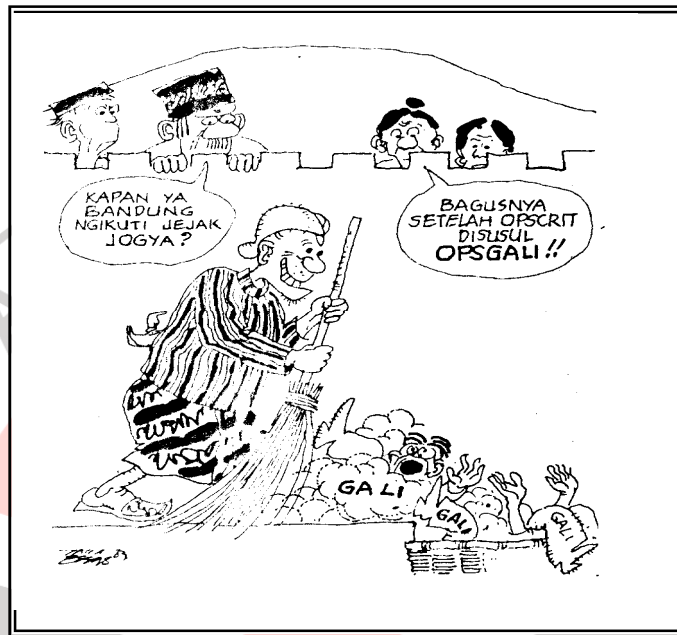
sedang mengalami masalah keamanan akibat ulah para Gali (Gabungan Anak-anak Liar). Gali ini merupakan sekelompok anak muda yang sering membuat onar, kejahatan, pemerasan dan tindak kejahatan lain terhadap masyarakat. Dalam sketsa masyarakat pun dijelaskan bahwa pada saat itu keresahan yang diakibatkan oleh ulah para Gali telah ditindak aparat yang berwenang.

Selain masalah pemberantasan Gali di Yogyakarta, sketsa masyarakat *Pikiran Rakyat* tanggal 1 Mei 1983 pun menggambarkan keadaan Bandung saat itu. Dalam perbincangan Bi Madhapi dan Mok Minah keadaan Bandung aman, tertib dan nyaman. Tetapi perbincangan tersebut disampaikan Bi Madhapi dengan ketakutan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya keadaan Bandung pada waktu itu berlawanan dengan apa yang dibicarakan Bi Madhapi. Pada saat itu stasiun, terminal, kendaraan umum, pasar dan tempat lainnya tidak aman. Ketakutan pun kerap dirasakan oleh para pedagang, pengusaha toko, bahkan oleh para pelajar yang kerap diperas dan dirampok oleh para pelaku kejahatan.

Dalam sketsa masyarakat ini pula dapat terlihat adanya kesenjangan yang terjadi antara orang kaya dengan masyarakat biasa. Di sana terlihat bahwa orang-orang kaya bisa menjamin keselamatannya dari segala bentuk kejahatan karena segala macam alat pengamanan. Salah satunya adalah dengan mempunyai pengawal. Tetapi berbeda dengan masyarakat biasa yang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri. Jika masyarakat biasa mendapatkan kesulitan akibat kejahatan, kadang-kadang orang lain yang menyaksikan hanya bisa diam karena takut ikut menjadi korban.



Melihat keadaan masyarakat Bandung yang semakin resah oleh kejahatan ada keinginan yang terlontar agar Bandung mengikuti model pemberantasan Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5.8  
Gambar Sketsa Masyarakat *Pikiran Rakyat* 1 Mei 1983  
(Sumber: Pt. Balai Iklan Bandung)

Dari sketsa masyarakat yang diterbitkan tanggal 1 Mei 1983 dapat ditangkap bahwa *Pikiran Rakyat* cenderung setuju dengan diberlakukannya pemberantasan kejahatan yang telah dilakukan di Yogya. Tetapi ada pula harapan lain yang diinginkan *Pikiran Rakyat* yaitu bahwa cara pemberantasan kejahatan tersebut bukan saja memberantas pelaku-pelaku kejahatannya. Tapi juga memberantas mental, kelakuan, dan langkah-langkahnya yang tidak terpuji.

### 5.3.2. Peristiwa Penembakan Misterius

Selain memuat berita dan pandangan mengenai latar belakang terjadinya penembakan misterius. *Pikiran Rakyat* pun menyoroti model pemberantasan kejahatan dalam tajuk rencana. Tajuk rencana tersebut, diterbitkan pada tanggal 2 Mei 1983 dengan judul *Pemberantasan "premanisme"*. Tajuk rencana tersebut berisi:

-“Gali adalah bagian dari apa yang sering kita dengar dengan nama “preman”. “Premanisme” itu terdapat hampir di semua kota besar di tanah air. Mereka memeras, di samping melakukan berbagai kejahatan, yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, “premanisme” perlu diberantas.

YOGYAKARTA secara intensif melancarkan pemberantasan “gali” (Gabungan Anak Liar). Gali adalah sekelompok pemuda, bahkan tak sedikit yang tak layak disebut pemuda lagi, yang kerjanya melakukan pemerasan. Sasarannya, umumnya terdiri dari para pedagang kecil, sopir-sopir, tukang parkir serta kelompok-kelompok masyarakat “lemah” lainnya. Untuk mencapai usahanya, tak jarang mereka melakukan kekerasan.

Perbuatan mereka tak lagi sekedar memeras, melainkan juga melakukan berbagai tindakan tercela itu secara terang-terangan tetapi juga tak jarang bersikap menyepelkan aparat keamanan. Pada saat-saat tertentu kadang-kadang bersikap lebih kuasa dari aparat keamanan sendiri.

Berkeliarannya gali yang terkoordinasikan secara rapih, berpengaruh terhadap banyak hal . Ketentraman masyarakat terganggu, sehingga menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman. Karena sasarannya juga objek-objek yang merupakan sumber pendapatan daerah, maka penerimaan daerah jadi tidak intensif. Dana yang terhimpun banyak yang tersedot ke kantong para gali sebelum sempat dipungut oleh para petugas penarik pajak yang resmi.

Kelompok-kelompok seperti itu tak hanya terdapat di Yogyakarta. Bahkan mungkin operasi gali di Yogyakarta tidak sehebat operasi kelompok sejenis di di berbagai kota besar di tanah air. Di berbagai kota besar, kelompok-kelompok demikian bisa bertindak lebih luar biasa lagi.

Pengaruh dari tindakan mereka pun lebih besar dan lebih luas pula. Tak mustahil koordinasi kerjanya juga lebih rapih dibandingkan dengan gali di Yogyakarta. Apabila pemberantasan intensif terhadap kelompok-kelompok seperti itu dimulai dari Yogyakarta, barangkali karena kondisinya lebih memungkinkan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas.

GALI merupakan salah satu bentuk dari “premanisme” dalam bentuk memungut “upeti” dari berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dalih untuk melakukan pungutan itu bisa bermacam-macam. Biasanya dengan alasan untuk pemeliharaan “keamanan”.

Mereka yang berusaha di pusat-pusat keramaian, akan terpelihara “keamanan”-nya apabila menyetor “upeti” secara tetap kepada salah seorang “preman” yang dianggap “pemimpin”, maka tidak akan ada lagi “anak buah” yang berani mengganggunya.

Masing-masing kelompok “preman” memiliki “wilayah kekuasaan” tersendiri. Mereka tidak boleh saling serobot dalam mengatur “rezeki” masing-masing. Hal itu menunjukkan bahwa koordinasi di antara mereka terjalin dengan baik. Mereka yang berusaha di pusat-pusat keramaian, mulai dari berdagang di kaki lima sampai para pemilik toko, akhirnya merasa lebih takut kepada “preman”, daripada kepada para petugas yang resmi, yang ditugaskan oleh pemda untuk melakukan pungutan-pungutan yang sah.

Tidak jarang, mereka yang mengaku pemimpin “preman” itu menjadi “backing” dari berbagai usaha yang melanggar hukum. Anehnya, kegiatan mereka itu berlangsung aman. Anggota masyarakat yang mengetahui praktek-praktek mereka, tidak berani melaporkannya kepada aparat keamanan. Seolah-olah ancaman kaum preman lebih kuat pengaruhnya daripada perlindungan aparat penegak hukum.

Karena kita tahu “premanisme” itu merupakan biang dari berbagai tindak kejahatan, maka tentu kita amat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pangkajeneidonegoro II Letjen TNI Yogie SM yang akan mengembangkan operasi pemberantasan kelompok-kelompok sejenis di berbagai kota lainnya. Operasi pemberantasan Gali di Yogyakarta yang ternyata berhasil baik, kiranya perlu segera diikuti oleh operasi pemberantasan kelompok-kelompok sejenis di berbagai kota lainnya. Membiarkan mereka dengan kegiatannya seperti sekarang, sama artinya dengan membiarkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Dari tajuk diatas, dapat dilihat bahwa secara jelas *Pikiran Rakyat* mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan. *Pikiran Rakyat* berpendapat bahwa membiarkan premanisme sama saja membiarkan terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Operasi pemberantasan Gali di Yogyakarta yang berhasil baik, kiranya perlu segera diikuti oleh operasi pemberantasan kelompok-kelompok sejenis di beberapa kota lainnya.

Lebih lanjut, *Pikiran Rakyat* menerbitkan tajuk rencananya yang lain pada tanggal 15 Mei 1983 yang berjudul *Tindakan Terhadap Penjahat*. Tajuk rencana tersebut menuliskan:

Kejahatan yang bentuknya semakin keras, sedang dihadapi oleh aparaturnya keamanan dengan tindakan yang keras pula. Tindakan itu tentu dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas kejahatan secara tuntas.

APARATUR keamanan saat ini sedang melancarkan tindakan-tindakan yang bukan hanya tegas melainkan keras. Pembersihan terhadap para penjahat dilakukan secara intensif. Tindakan keras itu, sebagaimana dikemukakan oleh Kadapol VIII/LLB Mayjen Drs.A. Herman Soedjnadwirja di Cikole Lembang Sabtu yang lalu, bukanlah tanpa alasan.

Tindakan kejahatan sekarang ini, menurut Kadapol VIII/LLB, sudah sering melampaui batas. Kejahatan sudah dilakukan dengan cara membunuh, menganiaya bahkan dengan tindakan-tindakan sadis. "Oleh karena sifat dan bentuk ancaman kejahatan berkadar tinggi, maka dalam pemberantasannya tidak ada cara lain, Polri harus bertindak tegas dan bila perlu dengan kekerasan," ujar Kadapol.

Kita bisa berkesimpulan bahwa tindakan keras yang dilakukan aparaturnya keamanan kepada para penjahat merupakan tindakan yang tidak boleh tidak harus dilakukan karena tuntutan keadaan. Oleh kejahatan yang semakin keras bentuknya, maka masyarakat kehilangan ketentraman hidupnya. Aparatur keamanan harus berusaha mengembalikan ketentraman masyarakat itu dengan berbagai cara.

Tindakan-tindakan lunak yang bersifat "edukatif" kepada para penjahat yang dilakukan selama ini, ternyata tidak mampu menurunkan frekuensi kejahatan. Barangkali karena tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini tidak cukup membuat jera para penjahat. Oleh karenanya, aparaturnya keamanan berpendapat perlu dilakukan tindakan keras untuk melumpuhkannya.

Oleh tindakan keras yang dilakukan aparaturnya keamanan, yang "gerakan"-nya bermula dari Yogyakarta dan dikembangkan di daerah-daerah lain termasuk Jawa Barat, banyak pelaku kejahatan yang berhasil digulung. Banyak orang yang selama ini dikenal sering melakukan tindakan kejahatan melalui pemerasan dan berbagai bentuk lain, telah "diamankan" oleh aparaturnya keamanan.

Dari pemberitaan-pemberitaan berbagai surat kabar, kita tahu banyak pelaku kejahatan yang "terbunuh" di tangan aparaturnya keamanan. Mungkin karena mereka melawan atau tidak juga memenuhi anjuran untuk menyerahkan diri. Tetapi disamping itu, kita juga acapkali membaca pemberitaan tentang "pembunuh misterius" terhadap berbagai "tokoh" pelaku kejahatan.

Karena aparaturnya sedang melancarkan tindakan keras, timbul dugaan dari beberapa pihak di masyarakat bahwa “pembunuhan misterius” itu termasuk rangkaian dari tindakan keras tersebut. Padahal tidak mustahil hal itu justru dilakukan oleh “tokoh” kejahatan pihak lain. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka terdiri dari berbagai komplotan yang satu sama lain bersaing.

Dugaan itu tentu sangat merugikan citra aparaturnya. Timbul kesan bahwa aparaturnya yang seharusnya berfungsi pula sebagai penegak hukum malah justru mengabaikan hukum. Reaksi semacam itu sudah mulai timbul. Bukan dari masyarakat awam melainkan dari anggota masyarakat yang memahami hukum. Hal itu tentu perlu segera dijernihkan.

Pada Tajuk di atas, *Pikiran Rakyat* menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan tindakan keras terhadap pelaku kejahatan. Tindakan keras itu dilakukan agar kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikendalikan. Namun dijelaskan kembali bahwa penembakan misterius yang saat itu sedang terjadi tidak termasuk kepada tindakan keras yang dilakukan oleh aparat keamanan. Melainkan dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari para preman yang bersaing memperebutkan daerah kekuasaan. Dari tajuk tersebut terlihat bahwa *Pikiran Rakyat* cenderung berkedudukan sebagai corong pemerintah.

Selain dalam tajuk rencana dan gambar karikatur, *Pikiran rakyat* pun memberikan pandangannya dalam catatan pojok “Ole-Ole” yang dijaga oleh Si Kabayan. Pada dasarnya Si Kabayan dengan cara “guyon” suka mengkritik. Namun dalam hal menanggapi penembakan misterius Si Kabayan cenderung kehilangan daya kritisnya. Dalam komentar-komentarnya, ia lebih banyak menyatakan dukungannya terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan aparaturnya.

Catatan pojok-catatan pojok yang dimuat *Pikiran Rakyat* diantaranya adalah sebagai berikut:

### Tegas

KADAPOL, jangan takut, menindak tegas setiap kejahatan maupun pelanggar hukum. Begitu kata Kapolri Anton Sudjarwo. Sebab kalau tidak, para penjahat jadi ngelunjak dan “cucungah”....Si Kabayan (*Pikiran Rakyat*, 2 Juni 1983)

### Kejahatan

KADAPOL Langlangbuana bilang, Polri saat ini terpaksa melakukan tindakan keras, karena kasus kejahatan yang terjadi khususnya di Jawa Barat sudah melampaui batas perikemanusiaan. Kalau kejahatan tidak ditindak, kepercayaan rahayat pada polisi salah-salah pada hilang.... Si Kabayan (*Pikiran Rakyat*, 4 Juni 1983)

### Senang

WAKIL ketua DPA Ali Murtopo bilang, putusan membasmi kejahatan diambil demi kepentingan rakyat banyak, dan sesudah dilaksanakan ternyata yang senang adalah rakyat banyak.

Itu betul. Teori mendirikan Negara juga buat kepentingan dan berpihak kepada rahayat, bukan kepada segolongan orang. Bikinlah rahayat itu senang mungkin di negaranya sendiri. Bukannya dibikin susah atawa dibikin tidak aman.... Si Kabayan (*Pikiran Rakyat*, 30 Juli 1983)

### Penjahat

Selain di pulau Jawa, di Sumatera Utara juga para pentolan-pentolan penjahat sudah banyak kedapatan tewas secara misterius.

Sebenarnya bagi yang tidak berbuat jahat sih tidak usah gelisah, karena mereka yang tewas ini sedang mengalami hukum karma, yakni yang berbuat jahat itu pada suatu saat akan mendapat hukuman juga.....Si Kabayan (*Pikiran Rakyat*, 21 Juni 1983)

### Keterlaluan

PANGDAM VII Dipenogoro Mayjen Sugiarto menegaskan, operasi pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara sampai saat ini bukan operasi terhadap gali saja, tetapi terhadap umumnya tindak kejahatan. Dan tindakan para penjahat itu sudah betul-betul keterlaluan dan benar-benar membuat keresahan, sehingga diperlukan tindakan keras dan tegas.

Ada yang bilang juga begitu, memang sudah keterlaluan. Bui dan penjara itu dianggap rumah prodeo sekedar buat beristirahat dan belajar lebih jahat dari teman “profesionalnya di LP.... Si Kabayan (*Pikiran rakyat*, 30 Juni 1983)

#### Penjahat

Kepala Bakin Yoga Sugama menegaskan, terbunuhnya para penjahat di Indonesia hendaknya tidak perlu dipermasalahkan. Kita hendaknya mencurahkan kepada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Itu tepat sekali. Keadilan dalam Pancasila itu buat rahayat, bukannya untuk penjahat....Si Kabayan (*Pikiran Rakyat*, 27 Juli 1983)

#### Aman

PANGKOPKAMTIB Jenderal Murdani menjelaskan, situasi keamanan pada umunya baik dan terkendali. Kejahatan di kota-kota besar akhir-akhir ini nampak semaki menurun, masyarakat telah merasa aman dan memperoleh pengayoman dari aparat keamanan.

Itu betul, dan rahayat mau keadaan aman itu begitu seterusnya....Si Kabayan. (*Pikiran Rakyat*, 25 Juni 1983)

#### Copet

Sejak Bandung musim “mayat dalam karung” para penumpang bis kota tidak pernah kecopetan lagi. Begitu kata para penumpang bis kota Cibereum-Cicaheum.

Barangkali si copet juga berpikir takut ada “copet masuk karung”....Si Kabayan. (*Pikiran Rakyat*, 6 Juli 1983)

Penembakan misterius yang terjadi pada awal tahun 1983 memang membawa hasil yang drastis. Kejahatan yang selama itu meresahkan masyarakat menurun dengan sangat cepat. Untuk menanggapi hal tersebut, *Pikiran Rakyat* menerbitkan tulisan bersambung yang dimuat dalam tiga edisi yang berbeda. Topik yang diangkat adalah tentang *Selamat Datang Keamanan dan Ketertiban*. Judul pertama yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 1983 adalah *Jangan Kembali Pemerasan dan Keresahan*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa dengan

menghilangnya manusia-manusia jahat akibat penembakan misterius, masyarakat seakan-akan bangun dari mimpi buruknya dan kembali ke dunia yang bebas dari kejahatan. Walaupun memang belum 100%, keadaan telah sedikit membaik. Masyarakat sudah bisa merasa lega dan aman bila ingin berjalan-jalan di malam hari. Dengan melihat semakin menurunnya berbagai tindak kejahatan, masyarakat mendukung sepenuhnya usaha penumpasan segala bentuk kejahatan. Namun dalam tulisan ini pula diingatkan bahwa penembakan misterius itu perlu ada terminal, yaitu perlu batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya batasan-batasan tersebut, dikhawatirkan penembakan misterius ini disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin memperkeruh keadaan.

Judul kedua yang diterbitkan adalah *Selama Ini Mencengkram Pedagang Kecil (Pikiran Rakyat, 22 Juli 1983)*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa selama ini yang menjadi korban dari para preman, residivis, dan pelaku kejahatan lainnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya adalah para pedagang kecil. Para preman seringkali membuat resah karena selalu memeras dan menarik uang keamanan dari para pedagang.

Pada tanggal 23 Juli 1983, *Pikiran Rakyat* kembali menerbitkan judul ketiga yaitu *Peristiwa Kejahatan Turun Drastis*. Dalam tulisan tersebut, Tim Wartawan “PR” menjelaskan keadaan masyarakat yang sudah dapat merasakan ketentraman kembali. Peristiwa penembakan terhadap para pelaku kejahatan telah membawa hasil yang cukup gemilang. Dalam waktu yang relatif sebentar angka kejahatan dapat menurun drastis. Tulisan tersebut merupakan tulisan yang menutup pembahasan tentang tema *Selamat Datang Kemanan dan Ketertiban*.



Berdasarkan pandangan yang disampaikan *Pikiran Rakyat* melalui tajuk rencana, catatan pojok dan karikatur, dapat dilihat bahwa dalam memberitakan tentang penembakan misterius *Pikiran Rakyat* berpandangan penembakan misterius tidak dilakukan oleh aparat keamanan. Melainkan dilakukan oleh sekelompok orang yang disinyalir para preman yang semakin terdesak oleh tindakan pemberantasan kejahatan yang dilakukan aparat keamanan. Pandangan *Pikiran Rakyat* cenderung mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, baik secara halus maupun dengan cara kekerasan. Hal ini berbeda dengan pandangan yang diberikan *Kompas* yang lebih kritis menanggapi penembakan misterius. Walaupun memang tidak secara terbuka.

### **5.3.3. Tanggapan Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Penembakan Misterius**

Sama halnya dengan *Kompas*, *Pikiran Rakyat* pun banyak menerima tanggapan yang berasal dari masyarakat. Tanggapan tersebut terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu yang pro dan kubu yang kontra. Surat dukungan terhadap tindakan penembak misterius pun ada yang sampai ke meja redaksi *Pikiran Rakyat*. Salah satunya adalah surat yang ditulis oleh Eddy Radia yang beralamat di Dayeh Kolot Bandung. Dalam suratnya yang dimuat *Pikiran Rakyat* tanggal 3 Agustus 1983, Eddy menyatakan salut dan bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh para penembak gelap. Selain itu, Eddy berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi sasaran penembak misterius adalah para penjahat dan juga

para koruptor. Alasan setuju terhadap penembakan misterius tersebut didasarkan pada sikap para penjahat dan koruptor yang tidak takut pada hukum yang berlaku.

Selain surat dukungan terhadap pelaksanaan penembakan misterius ada pula surat yang menyatakan keberatan atas tindakan tersebut. Surat tersebut dilayangkan oleh Md. Ediana. Surat Md. Ediana diterbitkan *Pikiran rakyat* pada tanggal 25 April 1983. Dalam suratnya, Md. Ediana menyatakan bahwa walaupun para Gali telah berbuat kejahatan tetapi cara yang diterapkan dengan cara keras tidak seharusnya dilakukan. Pertimbangannya tersebut mengingat bahwa para gali atau para pelaku kejahatan itu sama dengan kita yaitu ciptaan Tuhan. Biar pun mereka telah berbuat kejahatan tetapi mereka pun mempunyai kesempatan untuk hidup dan memperbaiki perbuatannya. Selain ada pertimbangan tersebut, Ediana pun mengingatkan bahwa cara pemberantasan dengan kekerasan selain diluar dari penegakan hukum, juga akan menimbulkan dampak lain. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penembakan misterius adalah akan menurunkan citra aparat yang berwajib. Karena aparat yang diharapkan dapat menegakan hukum, telah berlaku di luar hukum.

Surat yang dilayangkan oleh Md. Ediana dan diterbitkan *Pikiran Rakyat* pada tanggal tanggal 25 April 1983 telah melahirkan tanggapan dari pembaca. Surat tanggapan yang ditujukan kepada Md. Ediana salah satunya dilayangkan oleh seseorang yang nama dan alamatnya dijaga kerahasiaannya. Surat tersebut diterbitkan *Pikiran Rakyat* pada tanggal 3 Mei 1983 dengan isi surat sebagai berikut:

Menanggapi surat dari Sdr, M.D. Ediana tentang GALI, bahwa kita harus mencari faktor atau latar belakang yang menyebabkan mereka menjadi

Gali hal itu memang benar. Tetapi untuk hal itu saya kira, pemerintah sudah cukup bijaksana untuk mencari jalan keluarnya. Sebagai contoh kita ambil banyaknya Gali-Gali yang sudah diberi pendidikan, keterampilan, dan nyatanya mereka tetap kembali ke jalan yang sesat, dengan alasan tidak ada pekerjaan dsb-nya. Dalam tulisan saudara ada istilah “dihabisi”, saya kira itu tidak tepat, karena bila memang seorang petugas terpaksa menembak seorang penjahat, maka hal itu adalah kesajahan penjahat itu sendiri. Misalnya saja mereka melawan dan bagi petugas ini bukanlah tindakan kekerasan atau sewenang-wenang, tetapi merupakan suatu usaha untuk membela diri. Dan khusus untuk Sdr. M.D. Ediana, silakan anda tanyakan kepada semua lapisan masyarakat di Bandung ini, apakah mereka merasa aman bila bepergian di malam hari juga di siang hari?. Bila anda melakukan survey ini, maka anda akan memperoleh jawaban “lebih baik tinggal di rumah, dari pada jalan-jalan.” Atau mungkin anda belum pernah melihat, mendengar, dan membaca berita tentang kejahatan! Sungguh-sungguh mengherankan. Pada akhirnya saya akan tetap menunggu dan mengharapkan tindakan dari petugas keamanan dari kota Bandung yang dengan semangat yang tetap membara, jangan seperti “panas-panas tai ayam”.

Dari surat tersebut dapat terlihat bahwa kebanyakan dari masyarakat saat itu menyetujui. Bahkan ada kesan segala bentuk tindakan baik itu keras dan berada di luar hukum masyarakat akan setuju. Hal semacam inilah yang kemudian akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Masyarakat akan terbiasa dengan cara kekerasan sehingga mereka tidak lagi peka terhadap hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang tidak percaya hukum.

Tanggapan yang berasal dari pemerintah dimuat pula oleh *Pikiran Rakyat*. Dalam berita yang dimuat oleh surat kabar tersebut tanggal 23 Mei 1983, Menteri Kehakiman Ali Said S.H. ikut memberi tanggapan. Beliau berpendapat bahwa penembakan terhadap penjahat harus dilihat secara proposional dan tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Tindakan itu tidak berdiri sendiri melainkan tidak terlepas dari kejadian yang mendahuluinya. Menurutnya, penembakan gelap itu,

bisa saja akibat perkelahian antar “gang”. Tapi bisa juga dilakukan oleh petugas keamanan. Sulit membuktikan siapa yang melakukan penembakan itu. Namun, dalam hal ini menteri berpendapat bahwa apa artinya puluhan penjahat yang ditembak mati itu jika dibandingkan dengan ratusan ribu orang yang menjadi korban kejahatan mereka.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman Ali Said S.H. dapat dilihat bahwa peristiwa penembakan misterius ini banyak meninggalkan banyak pertanyaan, mulai dari pelaku sampai pada jumlah korban yang dijadikan sasaran penembakan misterius. Namun, tetap saja jawabannya tidak pernah muncul dalam tanggapan-tanggapan surat kabar. Bahkan setelah peristiwa ini tidak ramai dibicarakan, pembahasan mengenai penembakan misterius pun ikut menghilang. Jawaban mengenai permasalahan ini muncul beberapa tahun kemudian yaitu ketika Presiden Soeharto menjawab peristiwa tersebut dalam otobiografinya.